

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DI DESA WRINGIN, KECAMATAN WRINGIN,
BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:

IKA WULANDARI
NIM. E20163001

Dosen Pembimbing:

DARU ANONDO, S.E., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2020**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DI DESA WRINGIN, KECAMATAN WRINGIN,
BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

IKA WULANDARI
NIM. E20163001

Dosen Pembimbing:

DARU ANONDO, S.E., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2020**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DI DESA WRINGIN, KECAMATAN WRINGIN,
BONDOWOSO**

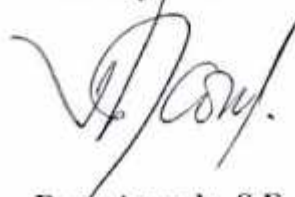
SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

IKA WULANDARI
NIM. E20163001

Disetujui Pembimbing



Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)
DI DESA WRINGIN, KECAMATAN WRINGIN,
BONDOWOSO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Februari 2020

Tim Penguji

Ketua



NIKMATUL MASRUOH, M.EI
NIP. 19820922 200901 2 005

Sekretaris



AGUNG PARMONO, S.E., M.Si
NIP. 19751216 200912 1 002

Anggota:

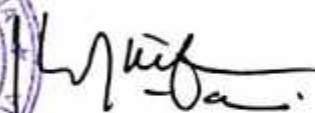
1. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si

2. Daru Anondo, S.E., M.Si



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْعُونَ مِمَّا آَعَمَلُوا وَأَنَا بَرِيْعٌ مِمَّا

تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad) maka katakanlah, "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”.** (Q.S. Yunus (10) : 41)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”* (Q.S Al-Mudassir (74): 38)

IAIN JEMBER

*Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cemani: UD. Fatwa), 213.

*Ibid., 576.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Muhamad Eksan dan Ibu Ria Farida yang tidak henti-hentinya mendo'akan, membimbing, menyayangi, mengarahkan dan menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan karya ini.
2. Kedua adik saya, Retno Dwi Yanti dan Muhammad Nizar Zakaria, yang telah memberikan semangat untuk menjadi orang yang lebih baik.
3. Seluruh keluarga besar baik dari Bani Imam Muslim maupun Bani Khairudin yang selalu memberikan dukungan.
4. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2016 yang telah memberikan rasa kekeluargaan di tanah perantauan.
5. Keluarga besar Racana Ki Bagus Pangalasan dan Nyai Retno Arum Pramuka IAIN Jember, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang luar biasa.
6. Keluarga besar Nusantara Youth Care Jember, jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, maupun negara dan bangsa.
7. Keluarga besar Kelas Inspirasi Bondowoso dan Kelas Inspirasi Nusantara, tetaplah menebar inspirasi dimanapun kalian berada.
8. Almamater IAIN Jember yang selalu saya banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur kami pajatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidyah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN BONDOWOSO” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata (S1) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan intelektual ini.

Kesuksesan dalam penyelesaian proposal penelitian ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Daru Anondo, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah sekaligus dosen pembimbing yang telah memberi arahan bimbingan serta

bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.

5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Seluruh civitas akademika perpustakaan IAIN Jember.
7. Kantor Desa Wringin yang telah memberikan ijin penelitian.
8. Kepala Desa beserta Aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, BPD, LPMD, dan PKK yang telah meluangkan waktu demi terlaksananya penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan proposal penelitian ini. Semoga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jember, 3 Februari 2020
Penulis

IKA WULANDARI
NIM. E20163001

ABSTRAK

Ika Wulandari, Daru Anondo, S.E., M.Si, 2019: *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso.*

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tiga prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso? (2) apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso? (3) apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso? (4) apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso secara simultan?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. (2) untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. (3) untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. (4) untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso secara simultan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, berjumlah 99 orang. Alat analisa data berupa uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. (2) transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. (3) partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. (4) akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana APBDes

ABSTRACT

Ika Wulandari, Daru Anondo, S.E, M.Si, 2019: *The Effect of Accountability, Transparency and Community Participation on the Management of a Village Income and Expenditure Budgeting (APBDes) Funds in Wringin, Sub District of Wringin Bondowoso.*

Good governance is the implementation solid and responsible, as well as efficient and effective of a state governance by maintaining a balance of constructive synergy between the domains of the state, the private sector, and society. The three main principles underlying *good governance* are accountability, transparency and participation.

The problems of this research were (1) did accountability affect the management of the Wringin, Sub District Wringin Bondowoso APBDes funds? (2) did transparency affect the management of the Wringin APBDes fund in Sub District of Wringin Bondowoso? (3) did community participation affect the management of the Wringin APBDes fund in Sub District of Wringin Bondowoso? (4) did accountability, transparency and community participation affect the management of Wringin APBDes in Sub District of Wringin Bondowoso simultaneously?

The objectives of this study were: (1) to analyze the effect of accountability on the management of the Wringin APBDes, Sub District of Wringin Bondowoso. (2) to analyze the effect of transparency on the management of the Wringin APBDes fund in Sub District of Wringin Bondowoso. (3) To analyze the effect of community participation on the management of the Wringin APBDes fund in Sub District of Wringin Bondowoso. (4) to analyze the effect of accountability, transparency and community participation on the management of the Wringin APBDes fund in Sub District of Wringin Bondowoso simultaneously.

This study used a quantitative approach to the type of descriptive research. The population in this study was the community of Wringin, Sub District of Wringin Bondowoso. The samples were determined by *purposive sampling* technique, consisting of 99 people. The data were analyzed by applying validity, reliability, classic assumption test and multiple linear regression analysis with the help of *SPSS Statistics* version 22.

This study concluded that: (1) accountability influenced the management of APBDes funds but it was not significant. (2) transparency had a significant effect on the management of APBDes funds. (3) community participation significantly influenced the management of APBDes funds. (4) accountability, transparency and community participation simultaneously had a significant influence on the management of APBDes funds.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, APBDes Fund Management

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1. Variabel Penelitian	16
2. Indikator Penelitian	17

F. Definisi Operasional.....	19
G. Asumsi Penelitian	20
H. Kerangka Konseptual	21
I. Hipotesis.....	23
J. Metode Penelitian.....	28
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
2. Populasi dan Sampel	28
3. Teknik dan Instrumen Penelitian	30
4. Analisis Data	32
K. Sistematika Pembahasan	42
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	44
A. Penelitian Terdahulu	44
B. Kajian Teori	56
1. <i>Good Governance</i>	56
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	56
b. Karakteristik <i>Good Governance</i>	57
2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	59
a. Pengertian Akuntabilitas	59
b. Macam-macam Akuntabilitas	61
c. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas	63
3. Transparansi (<i>Transparency</i>)	63
a. Pengertian Transparansi	63
b. Indikator Transparansi	67

c. Karakteristik Transparansi	67
4. Partisipasi	68
a. Pengertian Transparansi	68
b. Macam-macam Partisipasi	70
5. Pengelolaan APBDes	71
a. Pengertian Desa.....	71
b. Pemerintah Desa.....	72
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	73
d. Pengelolaan/Manajemen	78
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	89
A. Gambaran Objek Penelitian	89
1. Gambaran Umum Desa Wringin.....	89
2. Kondisi Geografis	89
3. Gambaran Demografis	90
4. Potensi Desa	91
5. Kelembagaan Ekonomi	92
B. Penyajian Data	93
C. Analsis dan Pengujian Hipotesis.....	96
1. Uji Instrumen Data.....	96
2. Uji Asumsi Klasik.....	98
3. Uji Regresi Berganda	103

D. Pembahasan.....	109
1. Analisis Variabel Independen terhadap Dependen	109
a. Variabel Akuntabilitas (x_1)	109
b. Variabel Transparansi (x_2)	111
c. Variabel Partisipasi Masyarakat (x_3).....	112
2. Analisis Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Simultan.....	113
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1 Indikator Penelitian	18
1.2 Kriteria <i>Skala Likert</i>	31
2.1 Persamaan dan Perbedaan	51
3.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	91
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian.....	92
3.3 Klasifikasi Responden.....	94
3.4 Pernyataan Responden terhadap Variabel x_1	94
3.5 Pernyataan Responden terhadap Variabel x_2	95
3.6 Pernyataan Responden terhadap Variabel x_3	95
3.7 Pernyataan Responden terhadap Variabel y	96
3.8 Uji Validitas	96
3.9 Uji Reliabilitas	98
3.10 Uji Multikolinieritas.....	100
3.11 Persamaan Regresi Linier berganda.....	104
3.12 Uji T (Parsial).....	105
3.13 Uji F (Simultan)	107
3.14 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	109

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Konseptual	22
1.2 Kerangka Hipotesis	24
3.1 Uji Normalitas	99
3.2 Uji Heteroskedastisitas	102



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Jurnal Penelitian
- Lampiran 5 : Matrik Penelitian
- Lampiran 6 : Indikator Kuisisioner
- Lampiran 7 : Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 8 : Data Hasil Responden Kuisisioner
- Lampiran 9 : Peta Desa
- Lampiran 10 : APBDes Desa Wringin Tahun 2019
- Lampiran 10 : Rekapitulasi Penduduk Per RT
- Lampiran 11 : Struktur Perangkat Desa
- Lampiran 12 : Susunan Keanggotaan TP PKK
- Lampiran 13 : Struktur Keanggotaan BPD
- Lampiran 14 : Struktur Keanggotaan LPMD
- Lampiran 15 : Hasil Output SPSS Tabel Frekuensi
- Lampiran 16 : Hasil Output SPSS Uji Validitas
- Lampiran 17 : Hasil Output SPSS Uji Raliabilitas
- Lampiran 18 : Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 19 : Hasil Output SPSS Uji Regresi Linier Berganda
- Lampiran 20 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengertian umum UU No.22 Tahun 1999 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Selanjutnya dalam penjelasan umumnya antara lain dikatakan bahwa desa mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa yang landasan pengaturannya adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa.² Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).³ Sistem tata kelola keuangan desa yang ada kemudian dikelola oleh pemerintah desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan

¹M. Nur Alamsyah, *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*, Jurnal *ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 650 02 Oktober 2011*, 649.

² Iqsan, *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (1), 230-240

³ Virgie K.A, Delawillia, dan Supranoto, *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2. Januari 2013, 94-103.

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.⁴

Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.⁵ Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi.

Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh.⁶ Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa.⁷

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan desentralisasi yang menggunakan prinsip-prinsip *good governance* adalah digunakannya berbagai variasi-variasi rill yang terdapat pada setiap wilayah

⁴ Hanifah, Suci Indah, *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 8 (2015), 4.

⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 24.

⁶ M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Malang: Setara Press, 2012), 328.

⁷ W. Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*(Banda Aceh: Read, 2011), 25.

desentralisasi. Dimana faktor penggunaan sumber daya publik yang efisien, dan seberapa jauh persepsi mereka terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi indikator penting. Kemudian tentang seberapa jauh pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada salah satu outputnya yaitu pada faktor ekonomi masyarakat yang dibangun dari ukuran umum yang berlaku untuk melihat kualitas pelaksanaan desentralisasi yang pada prinsipnya dilakukan untuk salah satu alasan yaitu kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat.⁸

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁹ Salah satu wujud dari bentuk otonomi yang ada adalah dengan adanya dana desa.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya

⁸ Alamsyah, *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*, 650.

⁹ Faridah & Suryono Bambang, *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol 4. No. 5, 2015.

diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa.¹¹ Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Kebijakan penggunaan dana desa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, tingkat pendapatan, dan tingkat inflasi yang stabil. Selain itu juga untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dengan mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata.¹²

¹⁰Y. Harahap Hulu, R.H. & Nasutian, M.A, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1), 2018, 147.

¹¹ Ibid., 148.

¹² Aziz, Nyimas Latifah Letty, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik Volume 13 No. 2 Desember 2016, 204.

Selain itu, desa dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (ekonomi, sosial, agama, dan budaya) dan bertanggung jawab.¹³

Di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.¹⁴ Karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁵

Good governance mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, mengandung makna tentang orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Berorientasi pada nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi dalam kehidupan bernegaran seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi dan

¹³ HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008), 169.

¹⁴ I Desak Nyoman Tri Wandari, Edy Sujaba, I Made Pradana Adi Puta, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng*, eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, vol 3 No. 1, 2015.

¹⁵ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*(Yogyakarta: ANDI, 2002).

pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintah yang bersifat ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan nasional.¹⁶

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.¹⁷ Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.¹⁸ Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

¹⁶ Budi Wiyoto, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 18.

¹⁷ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 15.

¹⁸ Hanifah, *Akuntabilitas dan Transparansi*, 6.

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.¹⁹

Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran.²⁰

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi.²¹ Efektivitas dari *good governance* dapat ditunjang dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemangku kebijakan serta partisipasi dari publik.

Keterkaitan antara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam menciptakan *good governance* adalah, transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, akuntabilitas akan sulit

¹⁹ Reynaldi Riantiarno dan Nur Azlina, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Pekbis Jurnal, Vol. 3, No. 3, November: 2011: 560-568.

²⁰ Nyoman, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi*, 2015.

²¹ James L.Gibson, et.al, *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses*, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban (Jakarta: Erlangga, 1995), 26.

terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.²²

Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan atas kebijakan kepada pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.²³

Masih banyaknya kasus penyimpangan anggaran pemerintahan ataupun dalam proses penganggaran dikarenakan kurangnya proses pengawasan dan kontrol yang dilaksanakan. Selama ini, pengawasan dan kontrol pengelolaan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Belum adanya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki aksesibilitas dan data tentang dokumen anggaran dan proses penganggaran yang ada. Namun, adanya konsep *good governance* memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.²⁴

²²Binti Sa'adah, *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government*. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015, 3.

²³ Ibid., 7.

²⁴ Ibid., 8.

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep dari perwujudan *good governance*, namun dalam pelaksanaan akuntabilitas tidak bisa lepas dari pelaksanaan transparansi. Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sumber daya publik yang seringkali terdapat penyimpangan adalah tentang anggaran pemerintah atau keuangan.²⁵

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.²⁶

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun

²⁵ Nico Adrianto, *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Ayumedia Publishing, 2007), 32.

²⁶ Hanifah, *Akuntabilitas dan Transparansi*, 7.

tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.²⁷

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.²⁸ Transparansi anggaran yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan yang menjabat sekarang, tidak ada kecurigaan lagi antara masyarakat dan pemerintah, aparat yang menjabat dapat terhindar dari penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan pemerintah daerah dapat terhindar dari tindak pidana korupsi.

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu. Masih banyaknya kasus korupsi yang ada di pemerintahan daerah menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola anggaran publik rendah. Hal ini akan berdampak juga terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Sehingga perlu adanya

²⁷Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 18.

²⁸ Hamid Muhammad, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), 31.

keterbukaan informasi tentang anggaran yang dapat diakses dimana saja, kapan saja oleh siapa saja.²⁹

Transparansi informasi merupakan salah satu syarat penunjang suatu pemerintahan dikatakan akuntabel. Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran pemerintah ialah bahwa ketika pemerintah mampu mempertanggungjawabkan seluruh tahapan penganggaran dan hasilnya berupa dokumen dan informasi yang ada secara horizontal dan vertikal tersebut. Selain itu, dengan upaya pertanggungjawaban yang ada tersebut dapat diakses dan masyarakat dapat mengetahuinya secara mudah, terbuka dan transparan, sehingga tidak ada kesan ditutupi.³⁰

Transparansi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Seberapa jauh warga dapat menilai tindakan pemerintah, hal ini tentu sangat tergantung pada transparansinya. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkan dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi, maka tidak akan ada akuntabilitas publik.³¹ Dengan adanya transparansi serta akuntabilitas yang baik, masyarakat akan lebih berperan serta dalam pengelolaan dana desa. Karena tidak dapat

²⁹ Adrianto, *Good e-Government*, 32.

³⁰ Sa'adah, Binti, *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government*. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015, 8.

³¹ *Ibid.*, 8.

dipungkiri, tanpa adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana desa, kecenderungan dana diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak semestinya ada, akan cenderung lebih besar.

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.³²

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti di wilayah Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso karena di wilayah tersebut mempunyai potensi perkembangan ekonomi yang baik. Hal ini dicantumkan dalam Profil Desa Wringin Tahun 2019 yang memaparkan bahwa potensi Desa Wringin terdiri dari dua sektor yaitu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Sumber daya alam terbagi atas Perkebunan 445,777 Ha, pertanian 24.505 Ha, juga sungai yang biasa dimanfaatkan untuk sarana air minum dan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk sumber daya manusia sendiri, hampir 61% masyarakatnya tercatat telah mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA dan Sarjana dan hampir 60,5% masyarakatnya telah tercatat telah memiliki mata pencaharian tetap.

³²Sumpeno, *Perencanaan*, 223.

Dengan adanya potensi tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso, dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan dalam penelitian sebagai pembatasan penelitian. Demikian permasalahan yang akan diteliti lebih fokus pada latar belakang penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso?

4. Apakah akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.³³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikantransparansi terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso.
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso.
4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso secara simultan

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2019), 37.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan.³⁴

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Wringin, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa khususnya pada Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

b. Bagi IAIN Jember

Bagi IAIN Jember, penelitian ini diharapkan selain untuk menambah kepustakaan di IAIN Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah juga dapat menuai banyak manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

³⁴Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis*(Yogyakarta: ANDI. 2006), 21.

c. Bagi Perangkat Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam pengambilan setiap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah bahwa penelitian ini terbatas ruang dan waktu. Batasan penelitian ini dijelaskan oleh ruang lingkup penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan indikator penelitian yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.³⁵

Variabel pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2015), 38.

dependen (terikat). Variabel bebas pada penelitian ini adalah akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2), dan partisipasi (x_3).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.³⁶ Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengelolaan dana APBDes (y).

2. Indikator Penelitian

Indikator penelitian adalah rujukan empiris dari variabel yang diteliti.³⁷ Indikator inilah yang menjadi alat ukur nilai variabel. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengelolaan dana APBDes.

Indikator variabel pada penelitian ini adalah:

³⁶ Ibid., 39.

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman*, 38.

Tabel 1.1
Indiator Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Akuntabilitas (x_1)	Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. ³⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Manajerial 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan 5. Akuntabilitas Finansial
Transparansi (x_2)	Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. ³⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan
Partisipasi (x_3)	Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. ⁴⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan keputusan 2. Pelaksanaan 3. Pengambilan manfaat 4. Evaluasi
Pengelolaan APBDes (y)	Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. ⁴¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggungjawaban

Sumber: Data diolah

³⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 20.

³⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi ketiga, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 224.

⁴⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18.

⁴¹ Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris secara variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.⁴²

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁴³

2. Transparansi

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.⁴⁴

3. Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman*, 62.

⁴³ Waluyo, *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*(Bandung: Mandar Maju, 2009), 195.

⁴⁴ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 19.

kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.⁴⁵

4. Pengelolaan APBDes

Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁴⁶

APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.⁴⁷ Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi Penelitian ini bisa disebut juga sebagai anggapan dasar, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data.⁴⁸ Asumsi pada penelitian ini yaitu ada pengaruh signifikan antara akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

⁴⁵ Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PKK, (Jakarta: 2007).

⁴⁶ Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

⁴⁷ Moh. Mahsun, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P, *Akuntansi Sektor Publik*(Yogyakarta: ANDI, 2015), 81

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman*, 39.

terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso.

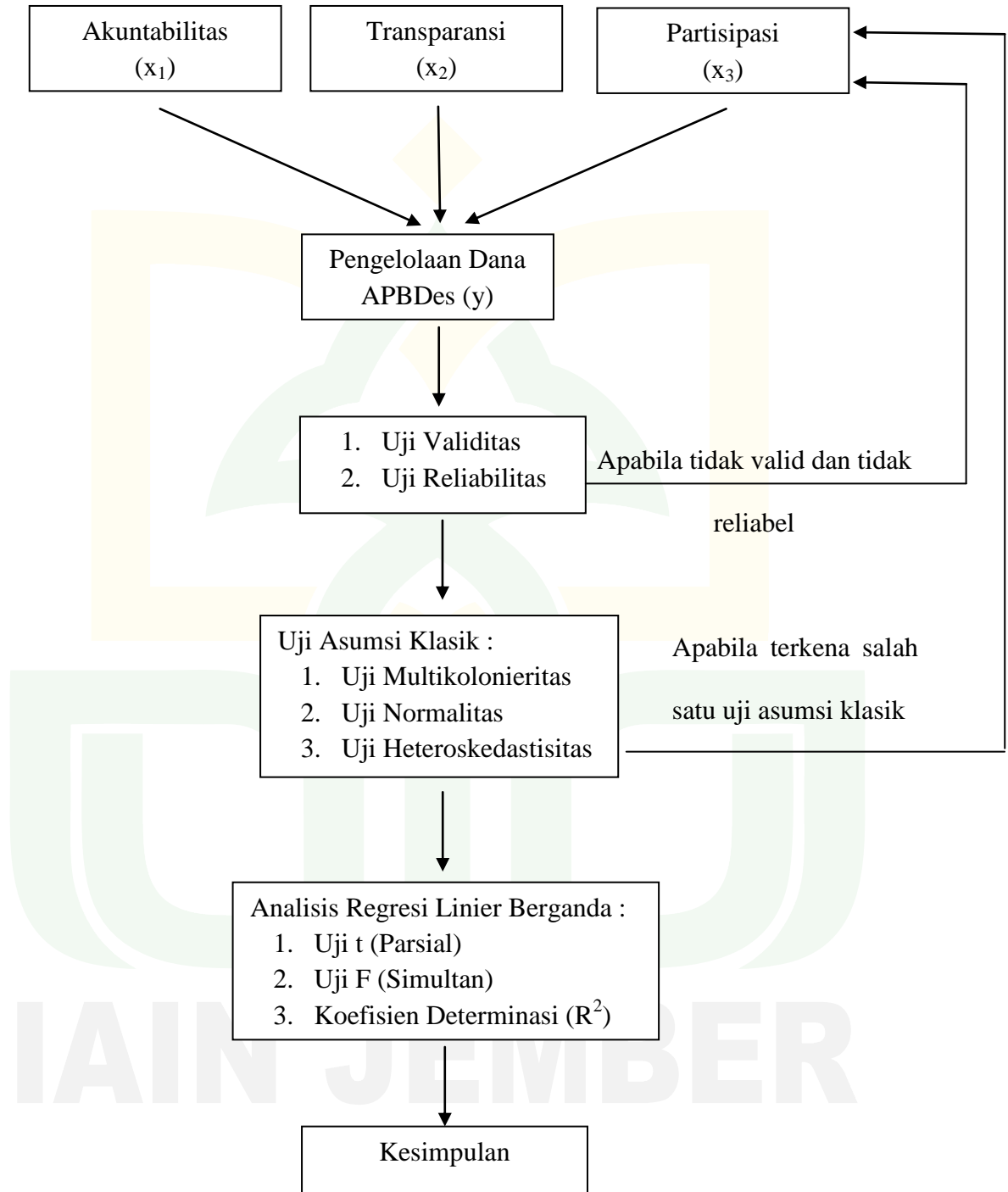
H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih.⁴⁹ Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



⁴⁹<https://yusrizafizal.wordpress.com/2010/11/22/kajian-teori-kerangka-konseptual-dan-hipotesis/amp/>, diakses pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019 pukul 21.30 WIB

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat dibedakan dalam hipotesis deskriptif, hipotesis argumentif, hipotesis kerja, dan hipotesis statistik atau hipotesis nol.⁵⁰

Hipotesis adalah pernyataan formal yang menjelaskan suatu hasil (*outcome*) dengan kata lain hipotesis adalah dugaan. Hipotesis adalah suatu proporsi dalam bentuk yang dapat diuji secara empiris. Dengan kata lain hipotesis adalah pernyataan atau proposisi yang dapat dinyatakan benar atau salah lewat uji empirik.⁵¹

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berfikir.⁵²

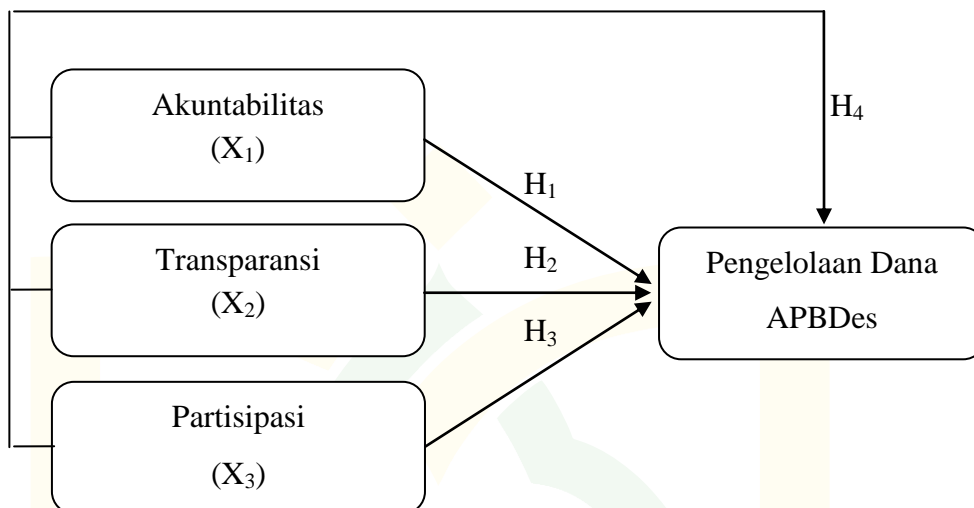
Kerangka hipotesis penelitian ini yaitu:

⁵⁰ Abdul Hamid, *Panduan Penulisan Skripsi, cetakan kesatu*(Jakarta: FEIS UIN Press, 2010), 16.

⁵¹ Imam Ghozali, *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis & Ilmu Sosial Lainnya* (Semarang: YOGA PRATAMA, 2016), 57.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 284.

Gambar 1.2
Kerangka Hipotesis



Sumber: Data diolah

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana APBDes

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian Weni (2017) yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁵³ Waluyo, *Manajemen Publik*, 195.

H₁: Terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana APBDes

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.⁵⁴

Berdasarkan hasil peneltian Weni (2017) yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* menunjukkan bahwa transparansi secara parsial signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Upaya dalam meningkatkan pengelolaan dana desa harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan dana desa adalah awal perencanaan penyusunan dana desa melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat. Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan pada skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan.

⁵⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik.*, 224.

Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap pengelolaan dana APBDes

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana APBDes

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga,, pikiran, atau dalam bentuk materiil.⁵⁵

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlihat dalam pengambilan keputusan di sctiap penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif, dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat komplain guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah.

⁵⁵ PTO PNPM PKK, 2007.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes

4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana APBDes

Good governance adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁵⁶

Dari sembilan karakteristik *good governance* terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁵⁶ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN BPKP RI*. (Jakarta: t.p, 2015).

⁵⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 289.

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes secara simultan.

J. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁸

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang merupakan wilayah (dimana) penelitian tersebut akan digeneralisasikan.⁵⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah Warga Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso yang berjumlah 7.443 warga.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang berisi beberapa anggota dalam populasi atau elemen dari populasi yang akan

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 8.

⁵⁹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 119.

membentuk sampel.⁶⁰ Teknik sampling pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampling yang berisi orang khusus yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik mungkin orang itu satu-satunya yang punya informasi atau orang itu memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.⁶¹

Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Warga yang menjabat sebagai perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, KAUR dan KASI.
- 2) Warga yang menjabat sebagai Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW.
- 3) Warga yang menjabat di kepengurusan BPD, LPMD dan PKK.

Dalam hal ini pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:⁶²

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

⁶⁰ Imam Ghozali, *Desain Penelitian*, 57.

⁶¹ Ibid, 140.

⁶² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 78.

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 10%.

Jadi, sampel dari penelitian ini sebanyak:

$$N = 7.443$$

$$e = 10\%$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{7443}{1 + 7443 (10\%)^2} \\ &= \frac{7443}{1+74,43} \\ &= 98,6742 \\ &= 99 \end{aligned}$$

Jadi, responden pada penelitian ini sebanyak 99 responden.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Kuisioner

Kuisioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dikirimkan per pos atau diserahkan pada responden guna diisi. Jawaban pertanyaan tersebut dilakukan sendiri oleh responden tanpa bantuan dari pihak peneliti.⁶³

Dalam penelitian ini, setiap pertanyaan dalam kuisioner penelitian adalah pengembangan dari indikator variabel. Untuk pemberian skor pada angket dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Jawaban

⁶³ Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik Jilid 1* (Jakarta: LP3S, 2008), 38.

setiap instrument yang menggunakan *skala likert* mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif.⁶⁴ Kriteria yang digunakan untuk penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan *skala likert* sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kriteria Skala Likert

No	Keterangan	Simbol	Skor
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Suliyanto (2019)

Penggunaan lima kategori dalam skala di atas dapat dipandang mewakili dengan baik tingkat intensitas penilaian responden.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru, seperti hasil pengisian kuisioner.⁶⁵

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 136.

⁶⁵ *Ibid.*, 19.

4. Analisis Data

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang teknis analisis data yang akan digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan segenap kemampuan teori dan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang dimilikinya guna untuk membuktikan hipotesis dari fenomena yang ditelitinya.⁶⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisa Data Kuantitatif

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik inferensial. Statistik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.⁶⁷ Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian, peneliti menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh.⁶⁸

b. Alat Analisis Data

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen

⁶⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 187.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 147.

⁶⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian*, 170.

yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur/diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti.⁶⁹

Adapun rumusan yang digunakan untuk menguji tingkat validitas instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus kolerasi. Hasil r_{hitung} kita bandingkan dengan r_{tabel} dimana $df=n-2$ dengan signifikan 2%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka valid dan sebaliknya.⁷⁰

2) Uji Realibilitas

Uji Reabilitas atau uji kehandalan adalah uji konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuisioner.⁷¹ Realibilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Realibel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan. Sehingga beberapa kali diulangpun hasilnya akan tetap sama (konsisten).⁷²

⁶⁹ Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika*(Bandung: Alfabeta, 2014), 348.

⁷⁰ V. Wirana Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 192.

⁷¹ Imam Ghozali, *Desain Penelitian*, 147.

⁷² Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika*, 348.

Pengukuran realibilitas dapat dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Alat ukur untuk mengukur relibilitas adalah *Cronbach Alpha*. Uji realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka reliabel dan sebaliknya.⁷³

Secara matematik rumus *Cronbach Alpha* adalah:⁷⁴

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \times \frac{S_T^2 - \sum S_I^2}{S_T^2}$$

Keterangan:

S_T^2 : Total varians dari jumlah item

S_I^2 : Varians setiap item

k : Jumlah item

3) Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (*Best Linear Unbias Estimator/ BLUE*) dari suatu persamaan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Least Squares*), perlu dilakukan pengujian dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi:⁷⁵

⁷³ Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, 192.

⁷⁴ Imam Ghozali, *Desain Penelitian*, 148.

⁷⁵ Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*(Malang: UIN Maliki Press, 2010), 252.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.⁷⁶

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan *ploting*.⁷⁷

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk

⁷⁶ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivisik dan Berbasis Pemecahan Masalah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 77.

⁷⁷ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: ANDI, 2011), 69.

korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas.

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas. Untuk menguji gejala multikolinieritas dengan melihat nilai TOL dan VIF dengan menggunakan SPSS.⁷⁸

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.⁷⁹ Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sebaliknya jika *scatterplot*

⁷⁸ Ibid, 81.

⁷⁹ Aminatus Zahriah, *Diktat Pengajaran Aplikasi Komputer Statistik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS 22)* (Jember: t.p, 2018), 78.

menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.⁸⁰

4) Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dengan dua variabel bebas (misalnya x_1 dan x_2) dan satu variabel terikat (y).⁸¹ Variabel bebas dari penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan dana APBDes. Adapun persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:⁸²

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + c$$

Keterangan:

y = Pengelolaan dana APBDes

α = Konstanta

β_1 = Koefisien variabel akuntabilitas

x_1 = Akuntabilitas

β_2 = Koefisien variabel transparansi

x_2 = Transparansi

β_3 = Koefisien variabel partisipasi masyarakat

⁸⁰ Suliyanto, *Ekonomi Terapan*, 95.

⁸¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 145.

⁸² Zahriyah, *Diktat Pengajaran*, 54.

x_3 = Partisipasi masyarakat

c = Error

Untuk mengetahui serta menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan bantuan SPSS. Ada beberapa uji yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Uji T (Parsial)

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval.⁸³ Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut:⁸⁴

(1) Menentukan Hipotesis

(a) $H_1 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_1 adalah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

$H_0 : b \neq 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

⁸³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 154.

⁸⁴ Mundir, *Statistik Pendidikan* (Jember: STAIN-Jember Press, 2014), 119.

(b) $H_2 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_2 adalah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

$H_0 : b \neq 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

(c) $H_3 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_3 adalah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

$H_0 : b \neq 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

(2) Menentukan drajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0.05$) dari t_{hitung} dan t_{tabel}

(3) Menentukan t_{hitung} dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = Nilai koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

(4) Menentukan t_{tabel} (diambil dari hasil tabel distribusi t pada $\alpha = 5\%$). Rumus $t_{tabel} = n - k$.

(5) Membuat kesimpulan:

Kriteria uji t :

- (a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, menyatakan bahwa variabel independen (x) mempengaruhi variabel dependen (y).
- (b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak mempengaruhi variabel dependen (y).

b) Uji F (Simultan)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil *F-test* ini pada *output* SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. Hasil *F-test* menunjukkan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen jika *P-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .⁸⁵ Adapun langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:⁸⁶

(1) Menentukan Hipotesis

- (a) $H_4 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen pengelolaan dana APBDes.

⁸⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi SPSS* (Semarang: Vadan Penerbit UNDIP, 2006), 127.

⁸⁶ Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika*, 86.

(b) $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen pengelolaan dana APBDes.

(2) Menentukan tingkat signifikansi dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ ($\alpha = 0.05$) dari F_{hitung} dan F_{tabel}

(3) Menentukan F_{hitung} dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Keterangan:

R : Nilai korelasi ganda

k : Jumlah variabel bebas (independen)

n : Jumlah sampel

(4) Menentukan F_{tabel} dengan pada $\alpha = 5\%$ dengan tingkat keyakinan 95%.

(5) Membuat kesimpulan

(a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

(b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_4 ditolak, menyatakan bahwa masing variabel independen

secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Pada regresi berganda, koefisien dari determinasi berganda mempresentasikan proporsi dari variasi y yang dijelaskan oleh seperangkat variabel independen.⁸⁷

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki variasi variabel dependen.⁸⁸

K. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang akan membahas permasalahan dari gambaran penelitian yang telah dipaparkan. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

⁸⁷ Sujoko Efferin dkk, *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 217.

⁸⁸ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 249.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format penulisan istematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁸⁹ Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan dasar dari penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan. Bab ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

Bab III Penyajian Data dan Analisis. Hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, serta pembahasan.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti.

⁸⁹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 42.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Tomi Viktoria (2014), dalam skripsinya di Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan, (2) Mengetahui akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan, (3) Mengetahui pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan skor 75,5% dalam melaksanakan kebijakan yang transparan, (2) SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori yang cukup dengan skor 80,6% dalam melaksanakan

kebijakan yang akuntabel, (3) Pengelolaan dana SMK Muhammadiyah Prambanan tergolong cukup dengan skor 78,6%.⁹⁰

2. Ni Wayan Rustiarini (2016), dalam Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung dengan judul “*Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dan praktik tata pemerintahan yang baik di Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologis mengeksplorasi penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan dana desa di Provinsi Bali secara normal sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam aplikasi di lapangan.⁹¹

3. Agus Wahyudi, Rr. Sri Pancawati M, Nurabiah (2017), dalam Simposium Nasional Akuntansi XX Jember dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud pada penelitian ini ialah tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun hasil dari

⁹⁰ Tomi Viktoria, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambana”, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), vi.

⁹¹ Ni Wayan Rustiarini, “*Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*”, (Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung, 2016), 1.

penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan baik.⁹²

4. Ulul Marzah (2017), dalam skripsinya di IAIN Jember dengan judul “Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meliputi sederhana, partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, transparan dan keadilan. (2) Hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas sebagaimana disebutkan diantaranya: masyarakat kurang mendukung, rendahnya imbalan, pengabaian kepentingan individu dan mementingkan kepentingan pribadi, buruknya sistem akuntansi, dan kurang keinginan dari semua pihak (masyarakat dan pemerintah).⁹³

⁹² Agus Wahyudi, Rr Sri Pancawati M., Nurabiah, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa”, (Simposium Nasional Akuntansi XX Jember, 2017), 1 .

⁹³ Ulul Marzah, “Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”, (Skripsi IAIN Jember, Jember, 2017), viii.

5. Budi Putri Utami (2017), dalam skripsinya di IAIN Surakarta dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten.” Tujuan penelitian ini adalah mengetahui transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Gondangsari Juwiring Klaten. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan APBDes di Desa Gondangsari sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴
6. Weni Ultrafiah (2017), dalam skripsinya di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* pada desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Jenis penelitian ini merupakan

⁹⁴ Budi Putri Utami, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten", (Skripsi IAIN Surakarta, Surakarta, 2017), xii.

penelitian asosiatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi secara parsial signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel partisipasi secara parsial tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* pada desa di Kecamatan Merapi Barat.⁹⁵

7. I Wayan Irvan M (2017), dalam skripsinya di Universitas Lampung dengan judul “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan. Faktor penghambat sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering

⁹⁵ Weni Ultrafiah, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017), xx.

terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa.⁹⁶

8. Siti Aisyah (2018), dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas, transparansi, dan mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Adapun hasil dari peneltian ini adalah menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Bagan Baru secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedurnya untuk tahun 2016 sudah cukup baik. Sedangkan pada tahun 2017 tidak demikian, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi desa yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Bagan Baru.⁹⁷

⁹⁶ I Wayan Irvan M, “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”, (Skripsi Universitas lampung, Lampung, 2017).

⁹⁷ Siti Aisyah, “Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Dan 2017)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), iv.

9. Robiansyah Eka Pratama (2018), dalam skripsinya di Universitas Lampung dengan judul “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat.⁹⁸

10. Giofani Inge Aria H (2019), dalam skripsinya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Air Mandidi belum sepenuhnya

⁹⁸ Robiansyah Eka Pratama, “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, (Skripsi Universitas Lampung, Lampung, 2018), ii.

dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawaban dana desa belum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.⁹⁹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tomi Viktoria (2014), Universitas Negeri Yogyakarta	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang akuntabilitas dan transparansi • Menggunakan jenis analisis deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai partisipasi sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai partisipasi • Penelitian sebelumnya meneliti Dana Pendidikan sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang dana APBDes
2.	Ni Wayan Rustiarini (2016), Simposium Nasional Akuntansi XIX	Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang pengelolaan dana desa • Menggunakan data primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya menggunakan metode pengumpulan data melalui

⁹⁹ Giofani Inge Aria H, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)", (Skripsi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2019), xiv.

	Lampung			wawancara sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode pengumpulan data kuisioner.
3.	Agus Wahyudi, Rr. Sri Pancawati M, Nurabiah (2017), dalam Simposium Nasional Akuntansi XX Jember	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas akuntabilitas • Penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang transparansi dan partisipasi, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang transparansi dan partisipasi.
4.	Ulul Marzah (2017), IAIN Jember	Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas akuntabilitas dan transparansi APBDes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif • Peneltiian sebelumnya tidak membahas tentang partisipasi masyarakat sedangkan penelitian yang sekarang membahas

				tentang partisipasi masyarakat
5.	Budi Putri Utami (2017), IAIN Surakarta	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas akuntabilitas dan transparansi APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode pengumpulan data kuisioner. • Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang partisipasi masyarakat sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang partisipasi masyarakat.
6.	Weni Ultafiah (2017), Universitas Muhammadiyah Palembang	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi • Penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya merupakan penelitian asosiatif sedangkan penelitian yang sekarang merupakan penelitian kuantitatif deskriptif • Studi empiris penelitian sebelumnya

		Lahat		berfokus pada satu kecamatan sedangkan penelitian yang sekarang hanya berfokus pada satu desa saja.
7.	I Wayan Irvan M (2017), Universitas Lampung	Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai transparansi • Membahas APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya tidak membahas akuntabilitas dan partisipasi sedangkan penelitian yang sekarang membahas akuntabilitas dan partisipasi • Penelitian sebelumnya merupakan penelitian asosiatif sedangkan penelitian yang sekarang merupakan penelitian kuantitatif deskriptif
8.	Siti Aisyah (2018), Universitas Islam Sumatera Utara	Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas Akuntabilitas dan transparansi • Menggunakan data primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif • Penelitian sebelumnya

		2016 Dan 2017)		membahas sistem prosedur pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penelitian yang sekarang tidak membahas sistem prosedur pengelolaan alokasi dana desa
9.	Robiansyah Eka Pratama (2018), Universitas Lampung	Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi • Penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif
10.	Giofani Inge Aria H (2019), Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Mimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua)	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang transparansi dan partisipasi sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang transparansi dan partisipasi • Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian

				kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah

B. Kajian Teori

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁰⁰

Good governance adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.¹⁰¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan yaitu penggunaan

¹⁰⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18.

¹⁰¹ Lembaga Administrasi Negara, *Modul*, 2015.

wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

b. Karakteristik *Good Governance*

Karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi:¹⁰²

1) *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu

3) *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan

¹⁰² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18.

kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan karakteristik *good governance* tersebut terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jumlah komponen ataupun prinsip

yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.¹⁰³ Dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah oleh pemerintah kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰⁴

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

¹⁰³ Sedarmayanti, *Sumber Daya*, 289.

¹⁰⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 9.

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹⁰⁵

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.¹⁰⁶

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:¹⁰⁷

¹⁰⁵ Waluyo, *Manajemen Publik*, 195.

¹⁰⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 20.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 21.

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

b. Macam-macam Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:¹⁰⁸

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

¹⁰⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 10.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program-program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DRP/DPD/dan masyarakat luas.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan APBDes mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam penggunaan dana desa, dimulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

c. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:¹⁰⁹

- 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
- 2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan desa.
- 3) Berkurangnya kasus KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) di dalam lingkup pemerintah desa.

3. Transparansi (*Transparency*)

a. Pengertian Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.¹¹⁰

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.¹¹¹

¹⁰⁹ Loina Lalolo Krina, *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 10.

¹¹⁰ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 19.

¹¹¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 224.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.¹¹² Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

¹¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18.

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.¹¹³

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan

¹¹³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 17-18.

pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya

Defenisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk.¹¹⁴

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
- 2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

¹¹⁴ Ibid., 18.

b. Indikator Transparansi

Indikator-indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- 3) Keterbukaan proses pengelolaan.
- 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.

c. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi yaitu:¹¹⁶

1) *Informativeness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

2) *Openess* (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data

¹¹⁵ Kristianen, *Transparansi Anggaran Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 73.

¹¹⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 19.

yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

3) *Disclouser* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

4. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.¹¹⁷

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi,

¹¹⁷ PTO PNPM PKK, 2007.

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹¹⁸ Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan.¹¹⁹

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.¹²⁰ Defenisi dari beberapa sumber di atas membuat penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat daiam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

¹¹⁸ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2010), 46.

¹¹⁹ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 20.

¹²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelum pembangunan masyarakatnya.

b. Macam-macam Partisipasi

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain:¹²¹

- 1) Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- 2) Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.

¹²¹ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 33.

- 3) Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- 4) Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

5. Pengelolaan APBDes

a. Pengertian Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.¹²² Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan

¹²² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: ERLANGGA, 2011), 1.

prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Lemahnya transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa,

yang menjadi objek resiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut.¹²³

APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih¹²⁴.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai,

¹²³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 20.

¹²⁴ Mahsun, *Akuntansi Sektor Publik*, 81.

belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.¹²⁵

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari:¹²⁶

1) Pendapatan

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengertian

¹²⁵ Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, 23.

¹²⁶ Mahsun, *Akuntansi Sektor Publik*, 83.

pendapatan daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah berdasarkan basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.¹²⁷

2) Belanja

Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan definisi belanja berdasarkan basis akrual adalah kewajiban

¹²⁷ Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, 96.

pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Belanja di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, meliputi:¹²⁸

- a) Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.
- b) Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- c) Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d) Transfer, dalam peraturan terdahulu tidak terdapat kelompok ini. Dengan keluarnya PP nomor 24 tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain, seperti

¹²⁸ Ibid., 100.

pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh Pemda.

Selanjutnya, definisi belanja berdasarkan basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3) Pembiayaan

Terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi).¹²⁹

Penerimaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Pengeluaran anggaran dikelompokkan, meliputi

¹²⁹ Ibid., 103.

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemda), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran diakui saat dikeluarkannya dari rekening kas umum daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disajikan dan disusun sesuai standart akuntansi pemerintahan.

d. Pengelolaan/Manajemen

Pengelolaan/manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹³⁰

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹³¹

Proses dari kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan.

¹³⁰ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 5.

¹³¹ T. Hani Handoko, *Manajemen*(Yogyakarta: BPFE, 2015), 8.

(Definisi lain mungkin mencakup daftar kegiatan yang lebih banyak).

Louis A. Allen mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹³² Organisasi menurut D. Mooney adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.¹³³ Penyusunan adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi.¹³⁴ Pengarahan merupakan pemberian bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan.¹³⁵ Sedangkan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹³⁶

Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun

¹³² Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, 39.

¹³³ *Ibid.*, 59.

¹³⁴ Handoko, *Manajemen*, 231.

¹³⁵ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, 11.

¹³⁶ *Ibid.*, 173.

anggaran, dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹³⁷

1) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.¹³⁸

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala

¹³⁷ Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

¹³⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28.

Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati dan dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f) Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,

bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- i) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah.¹³⁹

¹³⁹ Ibid., 19.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- h) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- j) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- k) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- m) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:¹⁴⁰

a) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku

¹⁴⁰ Ibid., 21.

kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4) Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

a) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

(1) Laporan semester pertama berupa laporan relisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan

Juli tahun berjalan.

(2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
 - c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
 - d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- 5) Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari:¹⁴¹

- a) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

(1) Format Laporan Pertanggungjawaban Ralisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;

(2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan

¹⁴¹ Ibid., 22.

(3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.



BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Wringin

Desa Wringin (*wri in*) merupakan Bahasa Jawa tetapi orang madura mengatakan *Bringin (bri n)* berasal dari kata benda yang artinya pohon besaryang tingginya bisa mencapai antara 20 sampai 35 m, berakar tunggang, daunnya kecil, berbentuk bulat telur meruncing ke ujung dan rimbun.¹⁴² Desa Wringin bermakna pohon Wringin yang sangat besar. Nama “Wringin” juga memiliki memiliki makna pada masyarakat Wringin, makna nama Wringin untuk masyarakat adalah do’a, agar usia daerah Wringin selalu panjang dan makmur seperti pohon wringin.¹⁴³

Desa Wringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Desa Wringin memiliki Nomor Kode Desa yaitu 430.12.12.12/2018.

2. Kondisi Geografis

Desa Wringin merupakan daerah yang berada di dataran tinggi dengan luas 627, 568 Ha. Secara umum batas-batas administrasi Desa

Wringin yaitu:

¹⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 87.

¹⁴³ Esi Amalisa, Kusnadi, Ali Bahrudin, *Penamaan Desa dan Dusun di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso (Kajian Epistimologi dan Sistematis)*, (Jurnal Publika Budaya Volume 1, Universitas Jember: Juni 2016), 4.

Utara : Desa Sumber Canting

Selatan : Desa Jatitamban

Barat : Desa Banyuputih

Timur : Desa Banyuwulu

Desa Wringin terbagi menjadi 8 dusun, 18 Rukun Warga (RW) dan 52 Rukun Tetangga (RT). Dusun tersebut yaitu Dusun Wringin Pasar, Wringin Krajan, Wringin Tengah, Wringin Utara, Wringin Barat, Palinggihan, Palongan Barat dan Palongan.

3. Gambaran Demografis

secara umum Desa Wringin mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Ini dapat dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk

Desa Wringin terdapat dua suku, yaitu Madura dan Jawa.

Sesuai dengan data sampai dengan Bulan Mei 2019, jumlah penduduk Desa Wringin sebesar 7443 jiwa yang terdiri dari:

Laki-laki : 3.774 jiwa

Perempuan : 3.669 Jiwa

Jumlah KK : 2.551 KK

Dari segi pendidikan yang telah ditempuh penduduk, dapat dipaparkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD	2511
2	SMP	1099
3	SMA	693
4	Sarjana	235
5	Belum Tercatat/Tidak Sekolah	2905
TOTAL		7443

Sumber: Profil Desa Wringin (2019)

4. Potensi Desa

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Wringin terbagi menjadi 3 sektor yaitu perkebunan, pertanian dan sungai.

- 1) Perkebunan: Budidaya perkebunan tanah tegal (kering) seluas 445,777 Ha bergantung pada air tadah hujan, sehingga komoditas hasil perkebunan (tembakau, kopi dan tanaman palawija) kurang maksimal.
- 2) Pertanian: Budidaya pertanian sawah seluas 24.505 Ha dengan sawah tadah hujan 60% dan sawah irigasi 40% dengan sumber air yang sangat kurang.
- 3) Sungai: Sumber mata air di Desa Wringin berada di daerah pegunungan yaitu Dusun Palongan dan Dusun Palongan Barat yang bisa dimanfaatkan untuk sarana air minum dan kebutuhan rumah tangga.

b. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan potensi yang ada, terdapat beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh penduduk Desa Wringin. Mata pencaharian penduduk Desa Wringin dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Petani	287
2	PNS	74
3	Buruh	821
4	Swasta	8
5	Pedagang	1.474
6	Wirausaha	37
7	Pensiunan	22
8	Tukang Bangunan	52
9	Peternak	737
10	Lainnya	991
11	Belum Tercatat/Tidak Bekerja	2940
TOTAL		7443

Sumber: Profil Desa Wringin (2019)

5. Kelembagaan Ekonomi

a. Pasar : 1 (Pasar Desa)

b. BUMDes

- 1) Pelembagaan : Berdasarkan SK Kepala Desa Wringin tentang kepengurusan BUMDES Sejahtera Nomor 028.4/21/430.12.5.10/2011 yang telah diperbaharui dengan Nomor SK Kepala Desa Wringin tentang kepengurusan BUMDES SEJAHTERA dengan Nomor SK : 136.4/21/430.12.5.12/2016 dengan susunan pengurus :

KETUA : RUDI

SEKRETARIS : DIDIK RAHMAN

BENDAHARA : ALDI

- 2) Pengembangan : Selama perjalanan BUMDES SEJAHTERA Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bergerak dibidang sektoriel yaitu pengadaan perlengkapan pesta berupa terop, meja dan kursi.

Untuk kedepannya usaha-usaha yang akan dikembangkan adalah

- a) Tape (Beragam Olahan Tape)
- b) Usaha sektoral yang menunjang potensi ekonomi desa.
- c) Sarana kios pasar untuk menunjang sarana pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat sebagai produk unggulan desa yang diharapkan nantinya menjadi ikon Desa Wringin.

B. Penyajian Data

Untuk memperoleh data mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, peneliti menggunakan 99 kuisisioner yang disebarakan kepada responden dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Klasifikasi Responden

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Aparat Desa	8
3	Ketua RT	52
4	BPD	9
5	LPMD	5
6	PKK	24
TOTAL		99

Sumber: Data diolah

Hasil pengisian responden terhadap kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas sebagai variabel x_1

Tanggapan responden terhadap akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pernyataan Responden terhadap Variabel x_1

No	STS	TS	N	S	SS	Total
1	1	6	16	66	10	99
2	0	8	21	62	8	99
3	0	2	39	47	11	99
4	1	10	28	45	15	99
5	0	7	27	58	7	99
6	0	2	23	68	6	99
7	0	2	24	61	12	99

Sumber: Data Olahan Kuisisioner, 2019

2. Transparansi sebagai variabel x_2

Tanggapan responden terhadap transparansi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pernyataan Responden terhadap Variabel x_2

No	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	9	20	68	2	99
2	0	11	29	47	12	99
3	0	3	42	44	10	99
4	0	5	24	59	11	99
5	1	4	36	48	10	99
6	0	6	23	58	12	99
7	0	3	20	66	10	99

Sumber: Data Olahan Kuisisioner, 2019

3. Partisipasi masyarakat sebagai variabel x_3

Tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pernyataan Responden terhadap Variabel x_3

No	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	6	22	68	3	99
2	0	7	32	53	7	99
3	0	3	32	50	14	99
4	0	2	13	63	21	99
5	2	4	23	65	5	99
6	1	7	21	61	9	99
7	0	3	27	60	9	99

Sumber: Data Olahan Kuisisioner, 2019

4. Pengelolaan dana APBDes sebagai variabel y

Tanggapan responden terhadap pengelolaan dana APBDes adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pernyataan Responden terhadap Variabel y

No	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	0	10	82	7	99
2	0	8	45	35	11	99
3	1	3	41	47	7	99
4	0	2	25	63	9	99
5	0	7	19	65	8	99
6	0	4	21	67	7	99
7	0	1	14	65	19	99

Sumber: Data Olahan Kuisisioner, 2019

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $(N - 2)$, $N = 99$. Jadi $df = 99 - 2 = 97$ dengan $(\alpha) 5\%$ (0,05) didapat $r_{tabel} = 0,1663$. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Uji validitas menggunakan menggunakan korelasi dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Alpha	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
1	Akuntabilitas (x_1)	X1.1	0,05	0,1663	0,711	Valid
		X1.2			0,757	Valid
		X1.3			0,546	Valid
		X1.4			0,766	Valid
		X1.5			0,725	Valid
		X1.6			0,567	Valid
		X1.7			0,620	Valid

2	Transparansi (x ₃)	X2.1	0,05	0,1663	0,618	Valid
		X2.2			0,734	Valid
		X2.3			0,584	Valid
		X2.4			0,614	Valid
		X2.5			0,623	Valid
		X2.6			0,664	Valid
		X2.7			0,528	Valid
3	Partisipasi Masyarakat (x ₃)	X3.1	0,05	0,1663	0,453	Valid
		X3.2			0,603	Valid
		X3.3			0,577	Valid
		X3.4			0,420	Valid
		X3.5			0,548	Valid
		X3.6			0,737	Valid
		X3.7			0,647	Valid
4	Pengelolaan Dana APBDes (y)	Y.1	0,05	0,1663	0,372	Valid
		Y.2			0,672	Valid
		Y.3			0,597	Valid
		Y.4			0,531	Valid
		Y.5			0,737	Valid
		Y.6			0,671	Valid
		Y.7			0,314	Valid

Sumber: Data diolah SPSS (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dikatakan valid karena $r_{tabel} < r_{hitung}$.

b. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Alat ukur untuk mengukur reliabilitas adalah *Chronbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai *Chronbach Alpha* > 0,60 maka reliabel dan sebaliknya.¹⁴⁴ Hasil pengujian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁴⁴ Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, 192.

Tabel 3.9
Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standarisasi	Keterangan
1	Akuntabilitas (x_1)	0,799	0,60	Reliabel
2	Transparansi (x_2)	0,741	0,60	Reliabel
3	Partisipasi Masyarakat (x_3)	0,678	0,60	Reliabel
4	Pengelolaan Dana APBDes (y)	0,646	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut adalah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

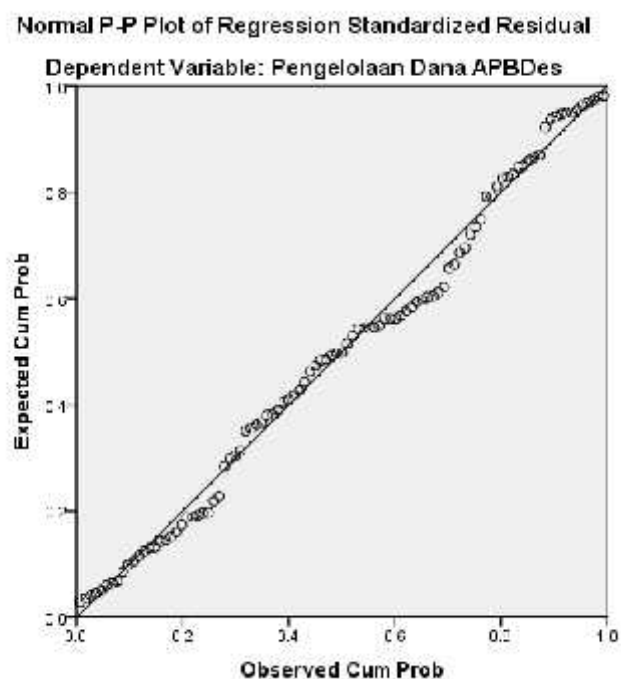
Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.¹⁴⁵

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

¹⁴⁵ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM*, 77.

Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah kekanan atas.¹⁴⁶ Hasil uji normalitas data menggunakan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Uji Normalitas



Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Dari tampilan grafik normal plot, terlihat titik-titik di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

¹⁴⁶ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, 69.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.¹⁴⁷ Adapun hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000		
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217	.454	2.205
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000	.367	2.724
Partisipasi	.401	.066	.392	6.111	.000	.509	1.966

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APDes

Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji multikolinieritas model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, karena dapat dilihat dari nilai *Tolerance* pada masing-masing variabel bebas atau independen lebih besar dari 0,10.

¹⁴⁷Ibid, 96

Sedangkan perhitungan VIF menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

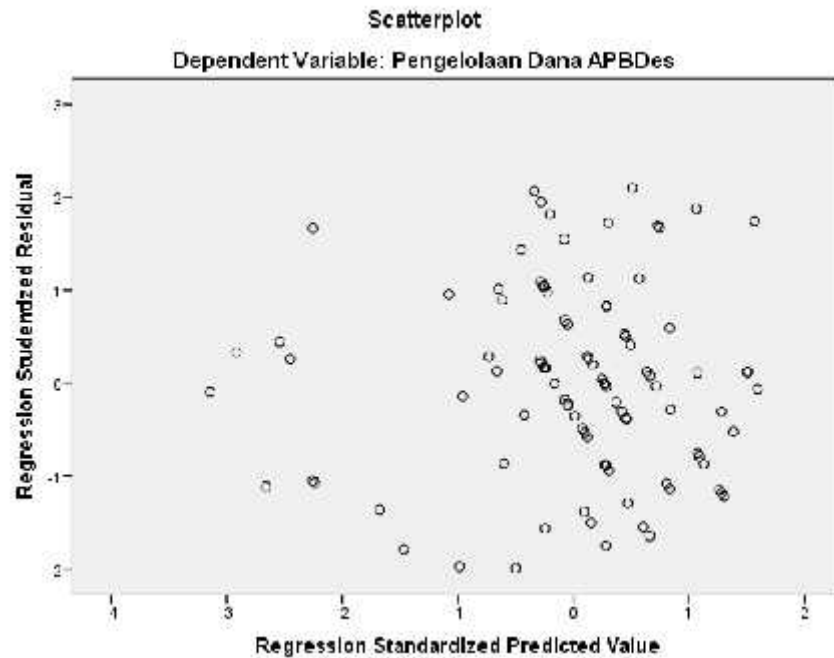
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.¹⁴⁸ Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sebaliknya jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.¹⁴⁹ Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

¹⁴⁸Zahriah, *Diktat Pengajaran Aplikasi*, 78.

¹⁴⁹Suliyanto, *Ekonomi Terapan*, 95.

Gambar 3.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* di atas, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data tersebut dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

IAIN JEMBER

3. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dengan dua variabel bebas (misalnya x_1 dan x_2) dan satu variabel terikat (y).¹⁵⁰ Variabel bebas dari penelitian ini adalah akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2) dan partisipasi masyarakat (x_3). Sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan dana APBDes (y). Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:¹⁵¹

$$y = + {}_1x_1 + {}_2x_2 + {}_3x_3 + c$$

Keterangan:

y = Pengelolaan dana APBDes

c = Konstanta

${}_1$ = Koefisien variabel akuntabilitas

x_1 = Akuntabilitas

${}_2$ = Koefisien variabel transparansi

x_2 = Transparansi

${}_3$ = Koefisien variabel partisipasi masyarakat

x_3 = Partisipasi masyarakat

c = Error

Hasil dari analisis regresi berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 145.

¹⁵¹ Zahriyah, *Diktat Pengajaran*, 54.

Tabel 3.11
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.926	1.128		4.368	.000
	Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217
	Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000
	Partisipasi Masyarakat	.401	.066	.392	6.111	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$y = + {}_1x_1 + {}_2x_2 + {}_3x_3 + c$$

$$y = 4,926 + 0,064x_1 + 0,415x_2 + 0,401x_3$$

Dimana:

y = Pengelolaan dana APBDes

x₁ = Akuntabilitas

x₂ = Transparansi

x₃ = Partisipasi masyarakat

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta () sebesar 4,926 menyatakan bahwa jika nilai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat konstan (tetap), maka pengelolaan dana APBDes adalah sebesar 4,926 artinya berpengaruh positif.

2. β_1 bernilai positif sebesar 0,064 menyatakan bahwa jika akuntabilitas mengalami kenaikan nilai satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,064 pada pengelolaan dana APBDes dengan asumsi nilai variabel lain tetap.
3. β_2 bernilai positif sebesar 0,415 menyatakan bahwa jika transparansi mengalami kenaikan nilai satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,415 pada pengelolaan dana APBDes dengan asumsi nilai variabel lain tetap.
4. β_3 bernilai positif sebesar 0,401 menyatakan bahwa jika partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,401 pada pengelolaan dana APBDes dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

a. Uji T (Parsial)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.12
Uji T (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000
Partisipasi Masyarakat	.401	.066	.392	6.111	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Adapun nilai t_{tabel} dalam penelitian ini adalah 1,98525. Nilai ini diperoleh dari $t_{tabel} = t(0,05/2 : 99-4)$. $t_{tabel} = t(0,025 : 95)$.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

1. H1 : Akuntabilitas (x_1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

H0 : Akuntabilitas (x_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

2. H2 : Transparansi (x_2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

H0 : Transparansi (x_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

3. H3 : Partisipasi masyarakat (x_3) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

H0 : Partisipasi masyarakat (x_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

Berdasarkan data di atas maka diperoleh:

1. Nilai t_{hitung} pada variabel akuntabilitas (x_1) adalah sebesar 1,242, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98525. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} 1,242 < 1,98525 t_{tabel}$) sedangkan tingkat signifikansi $0,217 > 0,05$. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

2. Nilai t_{hitung} pada variabel transparansi (x_2) adalah sebesar 6,800, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98525. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (t_{hitung} 6,800 > 1,98525 t_{tabel}) sedangkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.
3. Nilai t_{hitung} pada variabel partisipasi masyarakat (x_3) adalah sebesar 6,111, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98525. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (t_{hitung} 6,111 > 1,98525 t_{tabel}) sedangkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

b. Uji F (Simultan)

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes secara bersama-sama. Berikut ini hasil pengujian secara simultan dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Tabel 3.13
Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	525.463	3	175.154	128.045	.000 ^b
Residual	129.951	95	1.368		
Total	655.414	98			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Adapun nilai F_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 2,70. Nilai ini diperoleh dari $F_{\text{tabel}} = F(3 : 99-3)$, $F_{\text{tabel}} = F(3:96)$.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa F_{hitung} sebesar 128,045 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena itu probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($128,045 > 2,70$).

Maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas yang meliputi akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2), dan partisipasi masyarakat (x_3) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada regresi berganda, koefisien dari determinasi berganda mempresentasikan proporsi dari variasi y yang dijelaskan oleh seperangkat variabel independen.¹⁵² Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien dterminasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki variasi variabel

¹⁵² Efferin, *Metode Penelitian*, 217.

dependen.¹⁵³ Berikut ini tabel uji koefisien determinasi dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Tabel 3.14
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.895 ^a	.802	.795	1.170

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai R *Square* adalah 0,795. Hal ini dapat diartikan bahwa pengelolaan dana APBDes (y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau *independent* yaitu akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2), dan partisipasi masyarakat (x_3) dengan nilai sebesar 79,5%. Sedangkan sisanya ($100\% - 79,5\% = 20,5\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Analisis Variabel Independen terhadap Dependen

a. Variabel Akuntabilitas (x_1)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh perbandingan yaitu t_{hitung} 1,242 dengan tingkat signifikansi 0,217. Karena t_{hitung} 1,242 < 1,98525 t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,217 > 0,05.

¹⁵³Ikhsan, *Metodologi Penelitian*, 249.

Kesimpulannya adalah “Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana APBDes.”

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Maka pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam upaya mendorong pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan umum.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian Weni (2017) yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sesuai dengan temuan dalam penelitian ini yang berkesimpulan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

¹⁵⁴ Ultafiah, *Pengaruh Akuntabilitas*, 127

b. Variabel Transparansi (x_2)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh perbandingan yaitu t_{hitung} 6,800 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena t_{hitung} 6,800 > 1,98525 t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. Kesimpulannya adalah “Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana APBDes.”

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.¹⁵⁵ Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.¹⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian Weni (2017) yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* menunjukkan bahwa transparansi secara parsial signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang berkesimpulan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

¹⁵⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 224.

¹⁵⁶ Ultafiah, *Pengaruh Akuntabilitas*, 128

c. Variabel Partisipasi Masyarakat (x_3)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh perbandingan yaitu t_{hitung} 6,111 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena t_{hitung} 6,111 > 1,98525 t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. Kesimpulannya adalah “Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana APBDes.”

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.¹⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian Weni (2017) yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparasi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* menunjukkan bahwa partisipasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sesuai dengan temuan dalam penelitian ini yang berkesimpulan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

¹⁵⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18.

2. Analisis Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Simultan

Berdasarkan perhitungan Uji F dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. Terbukti dari hasil perhitungan *SPSS Statistics* versi 22 bahwa nilai F_{hitung} sebesar 128,045 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan F_{tabel} 2,70. Maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($128,045 > 2,70$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H_4 diterima dan H_0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tingkat akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat tinggi, maka pengelolaan dana APBDes akan maksimal.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen

a. Akuntabilitas (x_1)

Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu $t_{hitung} 1,242 < 1,98525 t_{tabel}$ sedangkan tingkat signifikansi $0,217 > 0,05$. Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas (x_1) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

b. Transparansi (x_2)

Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu $t_{hitung} 6,800 > 1,98525 t_{tabel}$ sedangkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi (x_2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y).

c. Partisipasi Masyarakat (x_3)

Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu t_{hitung} 6,111 > 1,98525 t_{tabel} sedangkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

2. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa variabel bebas yang meliputi akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2), dan partisipasi masyarakat (x_3) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y). F_{hitung} sebesar 128,045 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena itu probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($128,045 > 2,70$).

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi implikasi di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes.
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana APBDes dengan terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien, efektif, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pengelolaan Dana APBDes.
- d. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap jevutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan di desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya bilamana akan melakukan penelitian yang sama, karena penelitian ini hanya menggunakan kuisisioner atau angket, peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode selain kuisisioner seperti *interview* agar mendapat informasi dari subjek, memperluas cakupan sampel dan populasi. Peneliti bisa menggunakan variabel-variabel lain dalam prinsip *good governance* yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana APBDes misalnya *rule of law*, *responsiveness*, atau prinsip *good governance* lainnya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government..* Malang: Ayumedia Publishing.
- Dajan, Anto. 2008. *Metode Statistik Jilid 1.* Jakarta: LP3S.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia..* Jakarta: Balai Pustaka.
- Eferin, Sujoko, dkk. 2018. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi SPSS.* Semarang: Vadan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis & Ilmu Sosial Lainnya.* Semarang: YOGA RATAMA.
- Gibson, James L., et.al. 1995. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses,* Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, Abdul. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi, cetakan kesatu.* Jakarta: FEIS UIN Press.
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Cemani: UD. Fatwa
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.* Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianen. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. 2015. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN BPKP RI.* Jakarta: t.p

- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mundir. 2014. *Statistik Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: ERLANGGA.
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PKK. 2007. Jakarta.
- Prasetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Riduwan dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V. Wirana. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wirana. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Suliyanto. 2011. *Ekonomertika Terapan: Teori dan Apalikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumaryadi , I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Supriyanto , Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz. 2010. *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Teguh, Muhammad. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivisik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerag)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wiyoto, Budi . 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zahriyah, Aminatus. 2018. *Diktat Pengajaran Aplikasi Komputer Statistik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS 22)*. Jember: t.p

Undang-Undang

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Jurnal/Hasil Penelitian

Alamsyah, M. Nur. *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*, Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 650 02 Oktober 2011

- Amalisa, Esi, Kusnadi, Ali Bahrudi. *Penamaan Desa dan Dusun di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso (Kajian Epistemologi dan Sistematis)*. Jurnal Publika Budaya Volume 1, Universitas Jember: Juni 2016.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. Jurnal Penelitian Politik Volume 13 No. 2 Desember 2016.
- Faridah & Suryono Bambang. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol 4. No. 5.
- Hanifah, Suci Indah & Sugeng Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu Riset & Akuntansi, Vol.4 No. 8.
- Hulu, Y. Harahap, R.H. & Nasutian, M.A. 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1), 147.
- Iqsan, *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (1)
- Nyoman, I Desak, Tri Wandari, Edy Sujaba, I Made Pradana Adi Puta. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng*. eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, vol 3 No. 1.
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Pekbis Jurnal, Vol. 3, No. 3. November 2011.
- Rustiarinu, Ni Wayan. 2016. *Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Lampung: Simposium Nasional Akuntansi XIX
- Sa'adah, Binti. *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government*. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015
- Virgie K.A, Delawillia, dan Supranoto, *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2. Januari 2013.
- Wahyudi, Agus, Rr Sri Pancawati M, Nurabiah. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa*. Jember: Simposium Nasional Akuntansi XX

Skripsi

- Aiysah, Siti. 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- H, Giofani Inge Aria. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma.
- M, I Wayan Irvan M. 2017. *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi Universitas Lampung.
- Marzah, Ulul. 2017. *Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*. Skripsi IAIN Jember
- Pratama, Robiansyah Eka. 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi Universitas Lampung.
- Ultafiah, Weni. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Palembang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Utami, Budi Putri. 2017. *Analisis Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondongsari Juwiring Klaten*. Skripsi IAIN Surakarta.
- Viktoria, Tomi. 2014. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambana*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Internet

- <https://yusrizafrizal.wordpress.com/2010/11/22/kajian-teori-kerangka-konseptual-dan-hipotesis/>, diakses pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019 pukul 21.30 WIB

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Wulandari
NIM : E20163001
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan Dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso”** adalah benar-benar hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 3 Februari 2020
Yang Menyatakan



Ika Wulandari
NIM. E20163001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 686 /In.20/7.a/PP.00.9/10 /2019
Tempiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Wringin, Kec. Wringin, Bondowoso
di-
TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Ibu pimpinan
untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : IKA WULANDARI
NIM : E20163001
Semester : VII
Prodi : AKUNTANSI SYARIAH
No Telpn : 082334127996
Dosen Pembimbing : DARU ANONDO, S.E., M.Si
NIP : 19750303 200901 1 009
Judul Penelitian : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana APBDes Di
Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 14 Oktober 2019

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
DESA WRINGIN
Jl. Sukarno Hatta No 145 68252
BONDOWOSO

e-mail : admin@bondowosokab.go.id. Website : <http://www.bondowoso.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 470/ /430.11.12.12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Hj. SUMIATI
Jabatan : Kepala Desa Wringin

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : IKA WULANDARI
NIM : E20163001
Prodi : Akuntansi Syariah
Institut : IAIN Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kab Bondowoso untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Stabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana APBDes di Wringin Kec Wringin Bondowoso “ terhitung tanggal 22 – 29 November 2019

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Wringin, 09 – 12 – 2019

KEPALA DESA WRINGIN



HJ. SUMIATI

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Nama	Paraf
1	28 Oktober 2019	Menyerahkan surat ijin penelitian	Hj. Sumiati	
2	29 Oktober 2019	Diterima penelitian	Hj. Sumiati	
3	11 November 2019	Meminta data profil dan peta desa	Badrus Sholeh	
4	14 November 2019	Meminta data APBDes	Heru Febrianto	
5	22 – 29 November 2019	Menyebarkan kuisisioner	Hj. Sumiati	
6	9 Desember 2019	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	Badrus Sholeh	

Mengetahui.

KEPALA DESA WRINGIN



HJ. SUMIATI

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis	Rumusan Masalah
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso	1. Akuntabilitas (x ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Manajerial 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan 5. Akuntabilitas Finansial 	Data Primer, menggunakan kuisioner/angket	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif 2. Populasi dan saampel: penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> 3. Analisis data menggunakan statistik inferensial 4. Metode analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Uji Validitas b. Uji Reliabilitas c. Uji Asumsi Klasik: <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji Normalitas 2) Uji Multikolinieritas 3) Uji Heteroskedastisitas 	<p>H₁: Terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes</p> <p>H₂: Terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap pengelolaan dana APBDes</p> <p>H₃: Terdapat pengaruh signifikan antara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso? 2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso?
	2. Transparansi (x ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan 				
	3. Partisipasi masyarakat (x ₃)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan keputusan 2. Pelaksanaan 3. Pengambilan manfaat 4. Evaluasi 				

	<p>4. Pengelolaan Dana APBDes (y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggung-jawaban 		<p>d. Analisis Regresi Linier Berganda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji T 2) Uji F 3) Koefisien Determinasi 	<p>partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes</p> <p>H_4 : Terdapat pengaruh antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes secara simultan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso? 4. Apakah akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso secara simultan?
--	---------------------------------------	--	--	---	--	---

INDIKATOR KUISIONER

1. Akuntabilitas (x_1)

No	Pernyataan	Sumber
1.	Pemerintah desa telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa.	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 20. (Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum)
2.	Program APBDes ditetapkan dan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.	Mahmudi, <i>Manajemen Sektor Publik</i> , 10. (Akuntabilitas Manajerial)
3.	Pengalokasian APBDes mengikuti proses dan prosedur yang berlaku.	Mahmudi, <i>Manajemen Sektor Publik</i> , 10. (Akuntabilitas Program)
4.	Pelaksanaan program dana desa benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Mahmudi, <i>Manajemen Sektor Publik</i> , 10. (Akuntabilitas Program)
5.	Penggunaan dana APBDes didasarkan pada kepentingan publik	Mahmudi, <i>Manajemen Sektor Publik</i> , 10. (Akuntabilitas Kebijakan)
6.	Anggaran APBDes yang dirancang dan ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dianggarkan	Mahmudi, <i>Manajemen Sektor Publik</i> , 10. (Akuntabilitas Finansial)
7.	Pemerintah memiliki dokumen tertulis mengenai penggunaan dana desa.	Mahmudi, <i>Manajemen Sektor Publik</i> , 10. (Akuntabilitas Finansial)

2. Transparansi (x_2)

No	Pernyataan	Sumber
1.	Informasi mengenai APBDes dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 18. (Informatif)
2.	Akses memperoleh informasi keuangan desa mudah dan tidak berbelit-belit	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 18. (Informatif)
3.	Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan (terbuka)	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 19. (Keterbukaan)
4.	Pemerintah desa menyadari akan kewajiban untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 19. (Keterbukaan)
5.	Pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban dana APBDes	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 19. (Keterbukaan)
6.	Laporan pertanggungjawaban tahunan dilaksanakan tepat waktu	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 19. (Pengungkapan)
7.	Pemerintah desa terbuka dalam menyediakan dokumen-dokumen pendukung penggunaan dana desa	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 19. (Pengungkapan)

3. Partisipasi Masyarakat (x₃)

No	Pernyataan	Sumber
1.	Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan	Solekhan, <i>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i> , 33. (Pengambilan Keputusan)
2.	Pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan APBDes	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 18. (Pelaksanaan)
3.	Masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan APBDes	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 18. (Pelaksanaan)
4.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa	Mardiasmo, <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , 18. (Pelaksanaan)
5.	Program yang ditetapkan mengacu pada kepentingan masyarakat	Solekhan, <i>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i> , 33. (Pengambilan Manfaat)
6.	Program yang dipilih benar-benar efektif untuk mensejahterakan masyarakat	Solekhan, <i>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i> , 33. (Pengambilan Manfaat)
7.	Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan program dengan baik	Solekhan, <i>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i> , 33. (Evaluasi)

4. Pengelolaan Dana APBDes (y)

No	Pernyataan	Sumber
1.	Pengelolaan APBDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran	Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang <i>Pengelolaan Keuangan Desa</i> .
2.	Pemerintah membuat perencanaan dana APBDes dengan baik	V. Wiratna Sujarweni, <i>Akuntansi Desa</i> , 18. (Perencanaan)
3.	Pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara ekonomi, efektif, efisien dan adil merata	V. Wiratna Sujarweni, <i>Akuntansi Desa</i> , 19. (Pelaksanaan)
4.	Pemerintah desa melakukan pencatatan terhadap setiap pengelolaan keuangan	V. Wiratna Sujarweni, <i>Akuntansi Desa</i> , 21. (Penatausahaan)
5.	Pemerintah membuat laporan keuangan desa dengan baik, benar dan tepat waktu	V. Wiratna Sujarweni, <i>Akuntansi Desa</i> , 22. (Pelaporan)
6.	Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan	V. Wiratna Sujarweni, <i>Akuntansi Desa</i> , 22. (Pertanggungjawaban)
7.	Pengawasan pengelolaan keuangan desa menciptakan pengelolaan yang terarah, berdasarkan prosedur dan terkendali	V. Wiratna Sujarweni, <i>Akuntansi Desa</i> , 22. (Pertanggungjawaban)

DATA HASIL RESPONDEN KUISIONER

No	1	2	3	4	5	6	7	X1	1	2	3	4	5	6	7	X2	1	2	3	4	5	6	7	X3	1	2	3	4	5	6	7	y
1	5	4	2	4	3	4	4	26	2	4	4	5	4	5	5	29	4	4	5	5	4	5	5	28	4	5	5	3	4	5	4	30
2	4	3	4	3	4	4	3	25	4	4	3	3	4	4	4	26	3	4	4	5	3	4	4	24	3	5	4	4	3	4	4	27
3	4	3	4	4	5	5	5	30	4	3	4	4	5	4	4	28	4	5	5	4	4	4	5	27	4	3	4	4	5	4	4	28
4	4	3	3	4	4	4	4	26	4	3	4	4	3	4	4	26	2	4	3	4	2	4	4	21	4	2	4	4	3	4	3	24
5	3	4	3	3	4	4	3	24	3	4	3	3	4	4	3	24	3	4	3	3	4	4	3	21	3	4	4	3	4	4	3	25
6	4	4	3	3	4	4	4	26	3	4	4	4	3	4	3	25	5	4	3	4	4	3	4	22	4	3	3	4	4	5	4	27
7	2	3	3	3	4	4	3	22	3	4	3	3	4	3	2	22	3	4	3	4	3	3	4	21	3	4	4	3	4	3	4	25
8	3	4	4	3	3	5	4	26	4	4	3	4	5	4	5	29	4	3	4	5	4	4	3	23	4	3	4	5	4	4	4	28
9	4	3	4	4	3	4	4	26	4	2	3	4	3	4	3	23	3	4	4	4	3	3	4	22	4	3	3	4	4	3	5	26
10	4	4	3	4	4	4	3	26	4	4	3	4	3	4	4	26	4	3	3	4	4	4	3	21	4	3	4	3	4	4	4	26
11	4	4	3	4	4	4	3	26	4	4	3	4	4	4	4	27	3	4	4	4	3	4	4	23	4	4	3	4	4	4	3	26
12	4	3	4	4	4	4	4	27	4	5	4	3	4	5	4	29	4	3	4	4	5	4	4	24	4	3	4	5	4	4	4	28
13	4	4	3	3	3	4	4	25	3	3	3	4	4	4	4	25	4	4	4	3	3	4	4	22	5	4	3	4	4	4	4	28
14	4	4	3	3	3	4	4	25	4	3	3	3	4	3	4	24	4	4	4	4	3	4	4	23	4	3	3	4	4	4	4	26
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	3	3	4	26	4	3	4	4	4	4	4	23	4	3	3	4	3	4	4	25
16	4	4	3	3	4	4	4	26	4	3	4	3	4	4	4	26	4	3	4	4	3	4	4	22	4	4	4	3	4	4	4	27
17	4	4	3	4	3	4	4	26	4	4	3	3	4	4	3	25	4	3	4	3	4	3	4	21	4	4	3	3	4	4	3	25
18	3	2	3	2	2	3	3	18	3	3	4	4	3	4	4	25	4	4	3	4	3	3	4	21	4	4	3	4	4	4	3	26
19	4	4	3	3	4	4	4	26	4	4	3	3	4	4	5	27	4	5	4	4	3	3	4	23	4	3	3	4	4	3	4	25
20	3	4	4	3	3	3	4	24	4	4	5	4	3	3	4	27	4	4	5	4	4	5	4	26	4	5	4	4	5	4	4	30
21	3	4	3	3	4	4	5	26	4	3	4	4	3	3	4	25	4	4	3	3	4	4	5	23	4	4	3	4	4	5	4	28
22	2	4	4	4	4	4	4	26	3	4	3	4	4	3	4	25	4	4	5	4	3	4	5	25	4	3	4	4	3	4	5	27
23	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	3	4	3	3	4	25	3	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	4	4	4	26
24	4	4	3	4	4	3	4	26	4	3	4	5	3	4	2	25	3	4	2	3	4	5	2	20	4	4	3	4	2	4	3	24
25	4	3	4	5	3	4	4	27	4	3	4	3	3	4	4	25	3	4	3	4	4	5	4	24	4	3	4	5	4	3	4	27
26	4	3	4	4	3	4	4	26	4	3	4	3	4	3	4	25	3	4	4	3	4	4	3	22	4	4	3	4	3	4	4	26
27	3	4	4	4	4	4	3	26	4	4	3	3	4	4	4	26	4	3	3	4	4	4	4	22	4	3	4	4	3	4	4	26
28	4	4	4	3	3	4	4	26	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	4	4	4	26
29	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	4	4	4	26
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	4	4	4	4	27	3	4	4	4	4	4	4	24	4	5	5	4	4	4	4	30

31	3	2	3	4	2	2	3	19	3	2	3	2	3	2	3	18	3	2	3	2	3	2	3	15	3	2	3	2	3	3	4	20
32	2	3	3	2	3	4	3	20	3	2	3	3	2	2	3	18	3	4	3	2	3	2	3	17	3	2	4	3	2	2	5	21
33	3	2	3	2	3	3	2	18	2	2	3	2	3	3	2	17	3	3	4	5	3	2	3	20	3	2	3	3	4	3	5	23
34	3	2	3	2	2	3	2	17	3	2	2	3	3	2	3	18	3	3	2	3	1	2	3	14	3	2	1	3	2	3	5	19
35	5	4	3	3	4	4	3	26	3	3	3	3	2	2	3	19	4	3	4	4	4	3	2	20	4	3	3	3	2	3	3	21
36	4	3	3	4	4	3	4	25	4	4	3	4	3	4	4	26	4	3	4	4	3	4	3	21	4	3	4	4	4	3	4	26
37	4	3	4	4	5	4	3	27	4	3	4	5	4	3	4	27	3	4	4	3	4	4	3	22	4	5	4	3	4	4	3	27
38	3	2	4	1	2	3	3	18	2	3	2	3	1	3	3	17	2	3	4	4	2	3	4	20	3	2	3	3	2	3	4	20
39	4	5	4	5	4	4	4	30	4	5	4	4	5	5	4	31	4	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	3	4	4	4	28
40	5	4	2	4	3	4	4	26	2	4	4	5	4	5	5	29	4	4	5	5	4	5	5	28	4	5	5	3	4	5	4	30
41	4	4	3	4	3	3	4	25	4	4	5	4	3	4	4	28	4	4	4	5	4	3	4	24	4	3	4	4	4	3	4	26
42	5	4	4	5	4	4	5	31	4	5	4	4	5	4	4	30	4	4	4	5	4	3	4	24	4	4	3	5	4	4	4	28
43	4	5	5	5	4	4	5	32	4	4	5	3	4	4	4	28	4	3	3	4	4	4	4	22	4	4	3	4	4	4	4	27
44	5	4	4	4	5	3	5	30	4	3	3	4	3	2	4	23	3	2	5	5	4	3	3	22	4	4	3	3	3	3	3	23
45	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	28
46	5	5	5	5	4	5	4	33	5	3	4	4	4	4	3	27	2	4	2	4	4	4	4	22	4	4	3	4	5	4	5	29
47	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	4	28
48	4	4	5	3	4	4	3	27	3	4	4	5	4	5	3	28	4	3	5	5	4	4	4	25	5	4	3	4	4	4	5	29
49	4	4	5	4	3	5	4	29	4	4	5	4	4	5	4	30	5	3	4	4	4	5	4	24	4	4	5	3	4	4	5	29
50	4	4	5	5	5	3	4	30	3	3	4	5	4	5	4	28	4	4	5	5	4	4	4	26	5	4	3	3	4	4	5	28
51	1	2	3	2	3	3	4	18	4	4	3	4	3	5	3	26	3	2	3	5	1	3	4	18	5	3	2	3	3	2	4	22
52	5	3	4	4	4	3	4	27	2	2	3	4	3	3	3	20	3	2	4	4	4	3	3	20	4	3	3	3	3	2	3	21
53	4	5	4	3	4	3	4	27	4	5	4	4	3	4	3	27	4	2	3	4	3	2	3	17	4	3	3	4	4	3	4	25
54	4	5	4	3	4	4	3	27	3	3	4	5	4	4	3	26	4	4	3	4	5	4	3	23	4	3	4	4	4	4	5	28
55	4	4	3	5	4	4	3	27	4	4	5	4	3	4	4	28	4	4	5	4	3	4	5	25	4	3	4	4	5	3	4	27
56	4	5	4	4	4	5	4	30	4	5	3	4	5	4	3	28	4	3	4	5	3	4	4	23	4	5	4	3	4	4	5	29
57	4	4	5	5	5	4	5	32	4	4	3	4	3	5	3	26	4	3	3	5	5	4	4	24	3	4	4	5	4	4	4	28
58	3	4	3	2	3	3	5	23	3	4	3	4	3	5	3	25	5	3	3	4	5	4	3	22	3	4	4	5	4	4	4	28
59	4	4	5	3	4	4	4	28	4	4	5	4	4	3	4	28	4	3	4	3	4	4	3	21	4	4	3	4	5	4	3	27
60	2	2	3	2	2	2	3	16	2	2	3	2	3	2	3	17	2	2	4	4	3	2	3	18	4	3	3	2	3	2	2	19
61	2	2	3	2	2	3	3	17	2	2	3	2	2	3	4	18	2	3	4	4	2	2	3	18	4	2	2	3	2	4	4	21
62	2	3	3	2	2	3	3	18	2	2	3	2	2	4	5	20	2	2	4	5	2	1	3	17	4	2	2	3	2	3	4	20
63	4	5	4	5	4	4	4	30	4	5	4	4	5	5	4	31	4	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4	4	4	4	29

64	5	4	4	5	4	4	5	31	4	5	4	4	5	4	4	30	4	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	4	4	4	4	28
65	5	4	4	4	4	4	4	29	5	4	3	5	4	4	5	30	4	5	4	5	4	4	5	27	4	4	4	5	4	5	4	30
66	4	5	5	5	4	4	5	32	4	4	5	3	4	4	4	28	4	3	3	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	28
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	5	4	5	4	30	4	5	5	4	5	4	4	27	5	5	5	4	5	4	4	32
68	4	4	3	5	5	4	4	29	4	4	5	4	4	4	5	30	4	3	4	4	4	3	4	22	4	4	3	4	5	5	5	30
69	4	4	3	5	4	3	4	27	4	3	4	5	4	4	4	28	4	5	4	3	4	4	4	24	4	3	4	4	3	5	5	28
70	4	3	4	4	3	5	4	27	4	3	4	3	4	3	4	25	4	3	4	4	3	4	4	22	4	4	3	4	4	4	4	27
71	4	4	3	3	5	4	3	26	4	5	4	4	3	4	4	28	4	4	5	5	3	4	4	25	4	3	4	5	4	3	4	27
72	4	4	4	4	4	3	4	27	4	5	4	4	3	4	5	29	4	4	3	4	4	3	4	22	4	4	3	4	4	4	5	28
73	4	4	4	5	4	4	4	29	4	4	5	4	4	4	5	30	4	3	4	5	4	4	4	24	4	3	4	4	4	4	5	28
74	4	4	4	3	4	4	5	28	4	4	5	4	3	4	5	29	4	5	4	4	4	5	5	27	4	3	4	5	5	4	4	29
75	4	3	4	4	3	3	4	25	4	4	3	4	4	3	4	26	4	5	4	3	4	4	5	25	4	3	4	4	3	4	5	27
76	4	3	4	2	3	4	3	23	4	3	4	3	4	3	4	25	4	4	5	4	3	4	4	24	4	4	3	4	4	4	3	26
77	4	4	3	3	4	4	4	26	3	4	3	3	3	4	4	24	4	3	4	4	4	4	4	23	4	3	4	4	4	4	4	27
78	4	3	4	4	3	4	4	26	4	4	4	5	4	3	4	28	4	4	3	4	4	4	4	23	4	4	3	4	4	4	4	27
79	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	3	4	4	4	4	27	4	3	4	4	4	4	4	23	4	3	4	4	3	4	4	26
80	4	3	4	4	3	4	4	26	4	4	3	4	4	4	3	26	4	3	4	4	3	4	3	21	4	3	4	4	3	4	4	26
81	3	4	4	3	4	4	4	26	3	3	4	3	4	4	4	25	3	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	3	4	4	25
82	3	4	4	4	3	4	4	26	4	2	2	4	4	3	4	23	4	4	3	4	4	3	2	20	4	3	4	3	3	3	4	24
83	4	3	4	4	4	4	3	26	4	3	4	4	3	4	4	26	4	3	3	4	4	3	4	21	4	4	3	4	4	3	4	26
84	4	4	3	3	4	4	4	26	4	4	4	4	3	3	4	26	4	3	4	5	4	4	4	24	4	4	4	3	4	4	4	27
85	4	4	3	4	4	3	5	27	4	3	4	4	5	3	4	27	4	4	3	5	4	4	3	23	4	3	3	4	4	3	5	26
86	4	4	3	4	4	3	4	26	4	5	4	4	3	4	4	28	4	4	3	4	4	4	3	22	4	5	4	3	4	4	4	28
87	4	4	3	4	4	4	3	26	4	5	4	3	4	4	4	28	4	4	3	4	4	3	4	22	4	5	4	4	4	3	4	28
88	4	4	5	3	4	4	5	29	4	3	4	4	3	4	4	26	4	3	3	4	4	3	4	21	4	3	4	4	4	4	3	26
89	4	4	4	3	4	4	4	27	3	4	3	4	3	4	4	25	3	4	3	4	4	4	4	23	4	3	3	4	4	4	4	26
90	4	3	4	4	3	4	4	26	4	3	4	4	3	4	4	26	4	4	3	4	4	5	3	23	4	3	5	4	3	4	3	26
91	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	3	4	5	4	4	28	4	4	5	5	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	5	31
92	4	3	4	4	4	3	4	26	4	4	3	4	5	4	4	28	4	4	3	4	4	4	3	22	4	3	4	4	4	4	4	27
93	4	4	5	5	4	4	3	29	4	5	4	4	3	4	4	28	4	4	3	4	4	4	3	22	4	3	3	4	4	4	5	27
94	3	4	4	3	3	4	4	25	3	3	3	4	4	4	4	25	4	3	3	4	4	4	4	22	4	3	4	4	4	4	4	27
95	4	4	3	4	3	3	4	25	4	4	4	3	4	4	4	27	4	3	4	3	4	4	4	22	4	3	3	4	4	4	4	26
96	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	3	4	4	3	4	26	4	4	4	3	4	3	4	22	4	3	4	4	3	4	4	26

97	4	4	3	4	4	4	4	27	4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	5	5	4	4	4	26	4	3	4	4	4	3	4	26
98	4	4	4	3	4	4	4	27	3	3	4	3	4	4	4	25	3	4	3	4	4	4	4	23	4	3	4	4	4	4	4	27
99	3	4	3	4	4	4	3	25	3	4	3	4	4	3	4	25	3	4	4	4	3	3	3	21	4	4	3	4	4	4	4	27
	375	367	364	360	362	375	380	2583	360	357	358	373	359	373	380	2560	365	357	372	400	364	367	372	2232	393	346	353	376	371	374	399	2612
x	3,8	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8	26,09	3,6	3,6	3,6	3,8	3,6	3,8	3,8	25,86	3,7	3,6	3,8	4	3,7	3,7	3,8	22,55	4	3,5	3,6	3,8	3,7	3,8	4	26,38



DESA WRINGIN





IAIN JEMBER

APBDes 2019
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WRINGIN
KEC. WRINGIN KAB. BONDOWOSO

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa		4.000.000,00		
4.2	Pendapatan Transfer		1.793.011.475,00		
4.3	Pendapatan Lain-lain		0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN		1.797.011.475,00		
5	BELANJA				
1	BIDANG PENYELENGGRANAAN PEMERINTAHAN DESA		594.665.579,98		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa		445.721.269,11		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 Ob	36.000.000,00	ADD, PAD	KASI PEMERINTAHAN
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180 Ob	280.688.509,11	ADD, PAD	KASI PEMERINTAHAN
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa	1 Paket	12.842.760,00	ADD	KASI PEMERINTAHAN
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK dll)	1 Paket	58.990.000,00	ADD	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	108 Ob	22.800.000,00	ADD	KASI PEMERINTAHAN
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	1 Paket	5.000.000,00	ADD	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
1.1.07	Penyediaan Insentif/Opresional RT/RW	1 Paket	29.400.000,00	ADD	KASI PEMERINTAHAN
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		140.304.310,87		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**)	1 Unit	140.304.310,87	ADD, BPH	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistuk dan Kearsipan		3.490.000,00		
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 Paket	3.490.000,00	ADD	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		5.150.000,00		
1.4.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa/RPJMDesa/RKPDDesa, dll)	1 Paket	1.590.000,00	ADD	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa /RPJMDesa/RKPDDesa, dll)	1 Paket	155.000,00	ADD	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	1 Paket	3.360.000,00	ADD	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1 Paket	45.000,00	ADD	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.014.142.541,00		
2.1	Sub Bidang Pendidikan		220.677.982,00		
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	130 Orang	82.780.000,00	DSS	KASI PELAYANAN
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1 Unit	112.842.982,00	DSS	KASI PELAYANAN
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Belajar	1 Paket	25.055.000,00	DSS	KASI PELAYANAN
2.2	Sub Bidang Kesehatan		18.840.000,00		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	1 Paket	3.240.000,00	DSS	KASI PELAYANAN
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan Kls Bumil, Lansia, Insentif)	2 Paket	10.800.000,00	DSS	KASI PELAYANAN
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4 Paket	4.800.000,00	DSS	KASI PELAYANAN
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		506.170.271,00		
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	7 Titik	319.486.895,00	DSS	KASI PEMERINTAHAN
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1 Unit	46.240.576,00	DSS	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Saluran Air/Plengsengan/TPT	3 Titik	140.442.800,00	DSS	KASI PEMERINTAHAN
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		268.454.288,00		

2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Daya Air Bersih Milik Desa **)	2 Titik	94.019.788,00 DSS	KASI PEMERINTAHAN
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air ke Rumah Tangga **)		158.643.500,00 DSS	KASI PEMERINTAHAN
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll **)	4 Titik	15.791.000,00 DSS	KASI PELAYANAN
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		3.290.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		1.770.000,00	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat	1 Kali	1.770.000,00 ADD	KASI PELAYANAN
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		1.520.000,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	1 Kali	1.520.000,00 ADD	KASI PELAYANAN
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		220.178.750,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		37.500.000,00	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana UKMK dan Koperasi	150 Orang	37.500.000,00 DSS	KASI PELAYANAN
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		182.678.750,00	
4.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa	1 Unit	178.808.750,00 DSS	KASI PELAYANAN
4.7.04	Pembentukan/fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	150 Orang	3.870.000,00 DSS	KASI PELAYANAN
	JUMLAH BELANJA		1.832.276.870,98	
	SURPLUS/DEFISIT		-35.265.395,98	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan		35.265.395,98	



**REKAPITULASI PENDUDUK PER RT
DESA WRINGIN**

NO	DUSUN	NAMA RT DAN JUMLAH PENDUDUK			L/P	KK
		NAMA RT	L	L		
1	Wringin Pasar	P.ANDRIK	93	100	193	71
		P.ZAINUL	75	80	155	69
		P.FIROSATIN	84	87	171	69
		SUNARTO P.SUP	96	84	180	67
		SURAHMAD	68	84	152	43
		ADENAN	121	100	221	71
		MAHMUD	55	44	99	28
		NISAT	89	84	173	46
		FADLAN	106	92	198	72
		H. HAPIT	37	48	85	26
2	Wringin Krajan	P.UMAM	50	58	108	37
		P.HOR	61	55	116	37
		ZAKARIYA	59	55	114	36
		HARI	58	53	111	43
		IMAM SUGIANTO	78	59	137	47
		MURDA'I	100	89	189	67
		HORI	64	60	124	42
		SUHARTOK	64	45	109	39
		P.BAHUL	51	44	95	29
		MATHARI	66	65	131	43
		JAMAK P.TO	52	39	91	30
		ABDUL HALIM	64	54	118	37
		P.HAIRUL	63	64	127	41
3	Wringin Tengah	MISWAR	91	100	191	70
		SUKARMAN	44	43	87	27
		SADI	85	91	176	52
		SUMARDI	68	67	135	44
		BADI	73	83	156	65
4	Wringin Utara	MAHFUD	63	57	120	43
		EKO HP	49	53	102	38
		IMAM	42	39	81	26
		SADIN P.NO	56	78	134	37
		P.SUDAHNAN	78	66	144	56
		ANDI	59	50	109	35
		MUSTAR	90	82	172	44
		ELAN P.DANIL	57	63	120	44
		P.TUN	78	73	151	34
		SALIHAN P.ARIK	75	75	150	50
		BAHAR	69	64	133	46
		P.SUMARNI	46	41	87	28

		ALIMUNANDAR				
5	Wringin Barat	P.MIF	92	78	170	80
		SLAMET P.ZAINUL	100	106	206	77
		P.ANIS	74	68	142	41
		YON	73	74	147	56
6	Palinggihan	P.HENDRA	112	109	221	54
		JASULI	116	125	241	99
		HERMANTO	37	36	73	33
7	Palongan Barat	P.ROHANI	97	106	203	66
		SUPAKMO	97	104	201	67
		P.SULIS	62	57	119	57
8	Palongan Timur	ASWI	134	140	274	92
		JUMLAH	3.774	3.669	7.443	2551

Wringin, 31 Mei 2019

KEPALA DESA WRINGIN

HJ. SUMIATI



STRUKTUR PERANGKAT DESA
DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

Kepala Desa : Sumiati
Sekretaris Desa : Heru Febrianto
Kaur Keuangan : Robitul Alam
Kaur Umum : Raodatul Jannah
Kaur Perencanaan : Holilah Andriyani
Kasi Pemerintahan : Samsul Arifin
Kasi Kersejahteraan : Fathorrasi
Operator Desa : Didik Rahman



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TP PKK
DESA WRINGIN, KECAMAWAT WRINGIN
BONDOWOSO
PERIODE 2016 – 2021**

Ketua : Huzaimah
Wakil Ketua : Lilik P.A
Sekretaris : Ika Sri Suparmi
Bendahara : Maryati

POKJA 1
Ketua : Siti Rokayah
Wakil : Fitriah
Sekretaris : Ika Yunia
Anggota :
1. Suryani
2. Rosidah

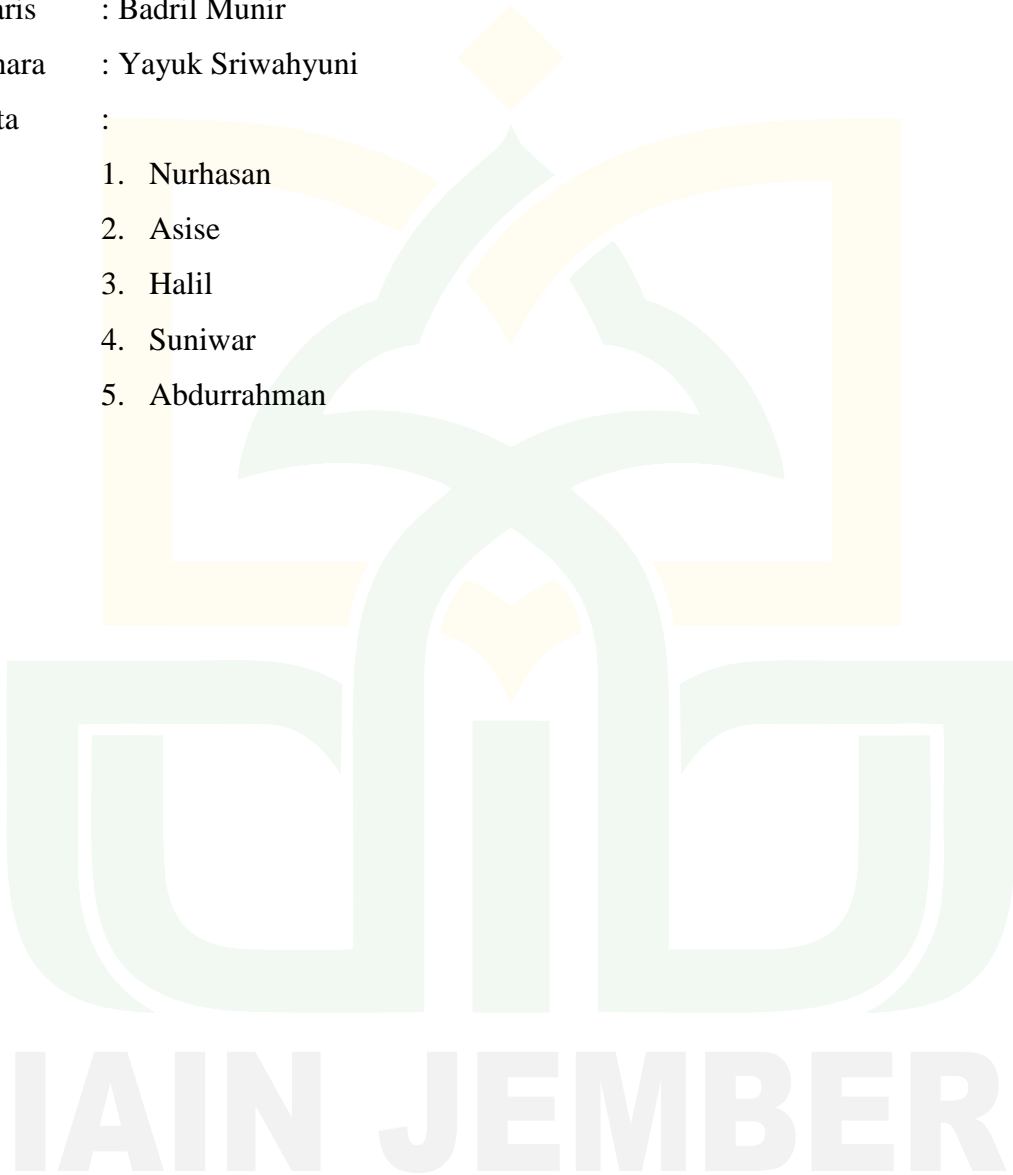
POKJA II
Ketua : Ida R
Wakil : Sri M
Sekretaris : Holisatul
Anggota :
1. Siti Amyana
2. Nurlaili

POKJA III
Ketua : Raodatul
Wakil : Farida R
Sekretaris : Holilah A
Anggota :
1. Surtana
2. Misyati

POKJA IV
Ketua : Suliyani
Wakil : Sutri Dian N
Sekretaris : Azizah
Anggota :
1. Hoariatun
2. Luluk Atin M

**STRUKTUR ORGANISASI BPD
DESA WRINGIN, KECAMATAN WRINGIN
BONDOWOSO**

Ketua : Sucipto
Wakil Ketua : M. Zaini
Sekretaris : Badril Munir
Bendahara : Yayuk Sriwahyuni
Anggota :
1. Nurhasan
2. Asise
3. Halil
4. Suniwar
5. Abdurrahman



**STRUKTUR ORGANISASI LPMD
DESA WRINGIN, KECAMATAN WRINGIN
BONDOWOSO**

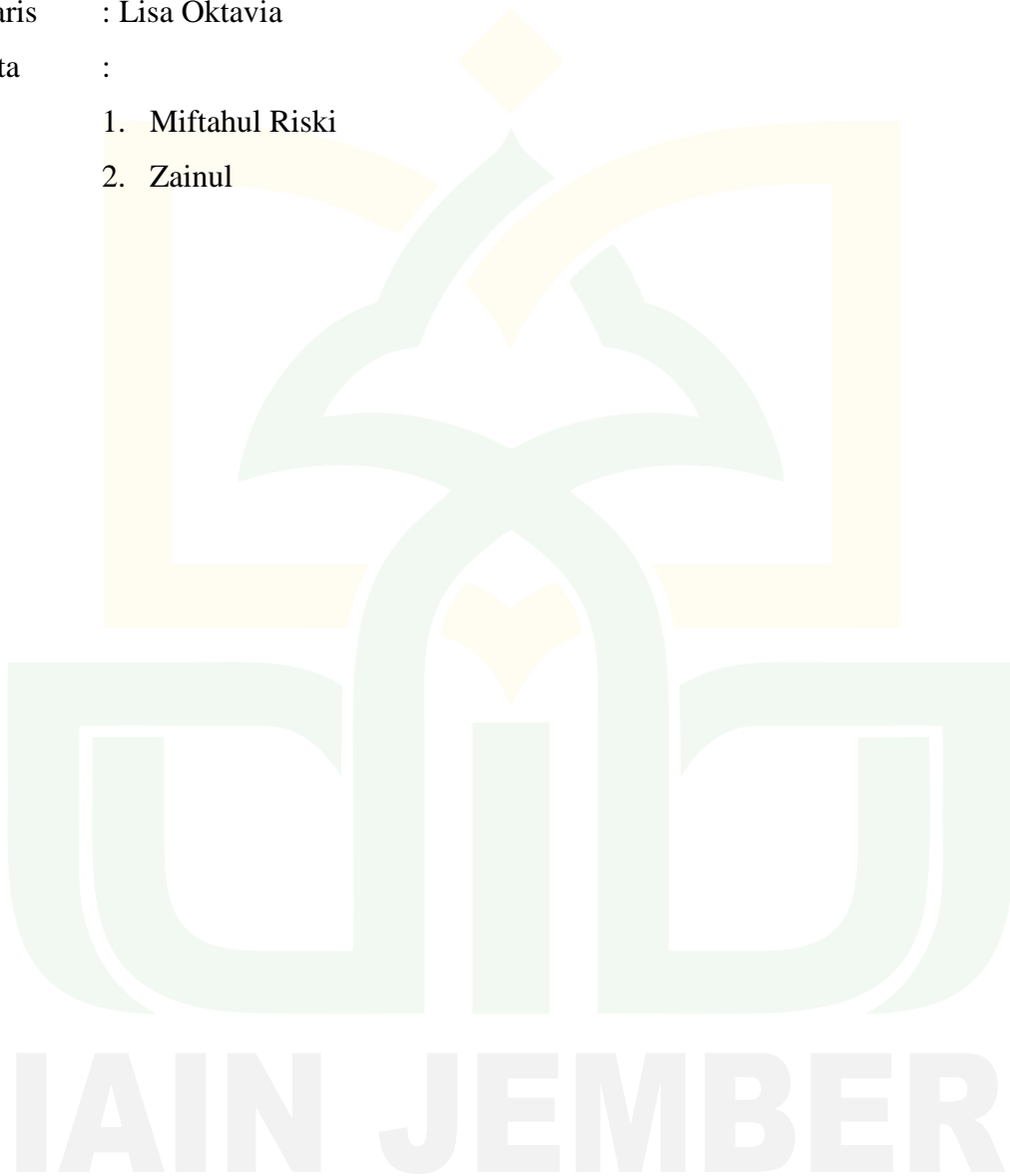
Ketua : Sukarman

Wakil Ketua : Feri Kurniawan

Sekretaris : Lisa Oktavia

Anggota :

1. Miftahul Riski
2. Zainul



Hasil Output SPSS Statistics Versi 22
Tabel Frekuensi

1. Akuntabilitas (x₁)

- a. Pemerintah desa telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa.

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	6	6.1	6.1	7.1
	N	16	16.2	16.2	23.2
	S	66	66.7	66.7	89.9
	SS	10	10.1	10.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- b. Program APBDes ditetapkan dan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	8.1	8.1	8.1
	N	21	21.2	21.2	29.3
	S	62	62.6	62.6	91.9
	SS	8	8.1	8.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- c. Pengalokasian APBDes mengikuti proses dan prosedur yang berlaku.

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.0	2.0	2.0
	N	39	39.4	39.4	41.4
	S	47	47.5	47.5	88.9
	SS	11	11.1	11.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- d. Pelaksanaan program dana desa benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	10	10.1	10.1	11.1
N	28	28.3	28.3	39.4
S	45	45.5	45.5	84.8
SS	15	15.2	15.2	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- e. Penggunaan dana APBDes didasarkan pada kepentingan publik

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	7	7.1	7.1	7.1
N	27	27.3	27.3	34.3
S	58	58.6	58.6	92.9
SS	7	7.1	7.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- f. Anggaran APBDes yang dirancang dan ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dianggarkan

X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.0	2.0	2.0
N	23	23.2	23.2	25.3
S	68	68.7	68.7	93.9
SS	6	6.1	6.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- g. Pemerintah memiliki dokumen tertulis mengenai penggunaan dana desa.

X1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.0	2.0	2.0
N	24	24.2	24.2	26.3
S	61	61.6	61.6	87.9
SS	12	12.1	12.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

2. Transparansi (x₂)

- a. Informasi mengenai APBDes dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	9.1	9.1	9.1
	N	20	20.2	20.2	29.3
	S	68	68.7	68.7	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- b. Akses memperoleh informasi keuangan desa mudah dan tidak berbelit-belit

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	11	11.1	11.1	11.1
	N	29	29.3	29.3	40.4
	S	47	47.5	47.5	87.9
	SS	12	12.1	12.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- c. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan (terbuka)

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	N	42	42.4	42.4	45.5
	S	44	44.4	44.4	89.9
	SS	10	10.1	10.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- d. Pemerintah desa menyadari akan kewajiban untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5.1	5.1	5.1
	N	24	24.2	24.2	29.3
	S	59	59.6	59.6	88.9
	SS	11	11.1	11.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- e. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban dana APBDes

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	4	4.0	4.0	5.1
	N	36	36.4	36.4	41.4
	S	48	48.5	48.5	89.9
	SS	10	10.1	10.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- f. Laporan pertanggungjawaban tahunan dilaksanaka tepat waktu

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	6.1	6.1	6.1
	N	23	23.2	23.2	29.3
	S	58	58.6	58.6	87.9
	SS	12	12.1	12.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- g. Pemerintah desa terbuka dalam menyediakan dokumen-dokumen pendukung penggunaan dana desa

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	N	20	20.2	20.2	23.2
	S	66	66.7	66.7	89.9
	SS	10	10.1	10.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

3. Partisipasi Masyarakat (x₃)

- a. Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	6	6.1	6.1	6.1
N	22	22.2	22.2	28.3
S	68	68.7	68.7	97.0
SS	3	3.0	3.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- b. Pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan APBDes

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	7	7.1	7.1	7.1
N	32	32.3	32.3	39.4
S	53	53.5	53.5	92.9
SS	7	7.1	7.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- c. Masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan APBDes

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3.0	3.0	3.0
N	32	32.3	32.3	35.4
S	50	50.5	50.5	85.9
SS	14	14.1	14.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- d. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.0	2.0	2.0
N	13	13.1	13.1	15.2
S	63	63.6	63.6	78.8
SS	21	21.2	21.2	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- e. Program yang ditetapkan mengacu pada kepentingan masyarakat

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	4	4.0	4.0	6.1
	N	23	23.2	23.2	29.3
	S	65	65.7	65.7	94.9
	SS	5	5.1	5.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- f. Program yang dipilih benar-benar efektif untuk mensejahterakan masyarakat

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	7	7.1	7.1	8.1
	N	21	21.2	21.2	29.3
	S	61	61.6	61.6	90.9
	SS	9	9.1	9.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- g. Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan program dengan baik

X3.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.0	3.0	3.0
	N	27	27.3	27.3	30.3
	S	60	60.6	60.6	90.9
	SS	9	9.1	9.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

IAIN JEMBER

4. Pengelolaan Dana APBDes (y)

- a. Pengelolaan APBDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	10	10.1	10.1	10.1
S	82	82.8	82.8	92.9
SS	7	7.1	7.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- b. Pemerintah membuat perencanaan dana APBDes dengan baik

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	8	8.1	8.1	8.1
N	45	45.5	45.5	53.5
S	35	35.4	35.4	88.9
SS	11	11.1	11.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- c. Pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara ekonomi, efektif, efisien dan adil merata

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	3	3.0	3.0	4.0
N	41	41.4	41.4	45.5
S	47	47.5	47.5	92.9
SS	7	7.1	7.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

- d. Pemerintah desa melakukan pencatatan terhadap setiap pengelolaan keuangan

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.0	2.0	2.0
	N	25	25.3	25.3	27.3
	S	63	63.6	63.6	90.9
	SS	9	9.1	9.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- e. Pemerintah membuat laporan keuangan desa dengan baik, benar dan tepat waktu

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7.1	7.1	7.1
	N	19	19.2	19.2	26.3
	S	65	65.7	65.7	91.9
	SS	8	8.1	8.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- f. Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4.0	4.0	4.0
	N	21	21.2	21.2	25.3
	S	67	67.7	67.7	92.9
	SS	7	7.1	7.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

- g. Pengawasan pengelolaan keuangan desa menciptakan pengelolaan yang terarah, berdasarkan prosedur dan terkendali

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	N	14	14.1	14.1	15.2
	S	65	65.7	65.7	80.8
	SS	19	19.2	19.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Hasil Output SPSS Statistics Versi 22
Uji validitas data variabel x₁, x₂, x₃, y

1. Akuntabilitas (x₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.446**	.200*	.554**	.435**	.298**	.349**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.047	.000	.000	.003	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.446**	1	.252*	.458**	.546**	.432**	.436**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000		.012	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	.200*	.252*	1	.299**	.266**	.310**	.289**	.546**
	Sig. (2-tailed)	.047	.012		.003	.008	.002	.004	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.4	Pearson Correlation	.554**	.458**	.299**	1	.486**	.264**	.388**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003		.000	.008	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.5	Pearson Correlation	.435**	.546**	.266**	.486**	1	.341**	.318**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.008	.000		.001	.001	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.6	Pearson Correlation	.298**	.432**	.310**	.264**	.341**	1	.180	.567**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.002	.008	.001		.075	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.7	Pearson Correlation	.349**	.436**	.289**	.388**	.318**	.180	1	.620**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000	.001	.075		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.711**	.757**	.546**	.766**	.725**	.567**	.620**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Transparansi (x₂)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.444**	.280**	.289**	.346**	.156	.218*	.618**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.004	.000	.124	.030	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	.444**	1	.290**	.305**	.355**	.473**	.242*	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.002	.000	.000	.016	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	.280**	.290**	1	.246*	.166	.295**	.314**	.584**
	Sig. (2-tailed)	.005	.004		.014	.102	.003	.002	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.4	Pearson Correlation	.289**	.305**	.246*	1	.270**	.400**	.187	.614**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.014		.007	.000	.064	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.5	Pearson Correlation	.346**	.355**	.166	.270**	1	.314**	.232*	.623**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.102	.007		.002	.021	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.6	Pearson Correlation	.156	.473**	.295**	.400**	.314**	1	.224*	.664**
	Sig. (2-tailed)	.124	.000	.003	.000	.002		.026	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.7	Pearson Correlation	.218*	.242*	.314**	.187	.232*	.224*	1	.528**
	Sig. (2-tailed)	.030	.016	.002	.064	.021	.026		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.618**	.734**	.584**	.614**	.623**	.664**	.528**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Partisipasi Masyarakat (x₃)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.173	.165	.105	.510**	.395**	.233*	.453**
	Sig. (2-tailed)		.087	.102	.302	.000	.000	.020	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.173	1	.126	-.095	.259**	.429**	.376**	.603**
	Sig. (2-tailed)	.087		.214	.349	.010	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	.165	.126	1	.342**	.043	.180	.366**	.577**
	Sig. (2-tailed)	.102	.214		.001	.671	.074	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.4	Pearson Correlation	.105	-.095	.342**	1	.028	.105	.190	.420**
	Sig. (2-tailed)	.302	.349	.001		.785	.303	.060	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.5	Pearson Correlation	.510**	.259**	.043	.028	1	.484**	.069	.548**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.671	.785		.000	.494	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.6	Pearson Correlation	.395**	.429**	.180	.105	.484**	1	.342**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.074	.303	.000		.001	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.7	Pearson Correlation	.233*	.376**	.366**	.190	.069	.342**	1	.647**
	Sig. (2-tailed)	.020	.000	.000	.060	.494	.001		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.453**	.603**	.577**	.420**	.548**	.737**	.647**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Pengelolaan Dana APBDes (y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.230*	.024	.094	.252*	.169	.004	.372**
	Sig. (2-tailed)		.022	.814	.352	.012	.095	.971	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y.2	Pearson Correlation	.230*	1	.379**	.059	.459**	.401**	-.072	.672**
	Sig. (2-tailed)	.022		.000	.559	.000	.000	.476	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y.3	Pearson Correlation	.024	.379**	1	.167	.306**	.281**	.030	.597**
	Sig. (2-tailed)	.814	.000		.098	.002	.005	.766	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y.4	Pearson Correlation	.094	.059	.167	1	.371**	.326**	.123	.531**
	Sig. (2-tailed)	.352	.559	.098		.000	.001	.225	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y.5	Pearson Correlation	.252*	.459**	.306**	.371**	1	.331**	.112	.737**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.002	.000		.001	.269	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y.6	Pearson Correlation	.169	.401**	.281**	.326**	.331**	1	.123	.671**
	Sig. (2-tailed)	.095	.000	.005	.001	.001		.226	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y.7	Pearson Correlation	.004	-.072	.030	.123	.112	.123	1	.314**
	Sig. (2-tailed)	.971	.476	.766	.225	.269	.226		.002
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.372**	.672**	.597**	.531**	.737**	.671**	.314**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Output SPSS Statistics Versi 22
Uji Reliabilitas

1. Akuntabilitas (x₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	22.30	8.519	.573	.764
X1.2	22.38	8.341	.638	.752
X1.3	22.41	9.470	.377	.799
X1.4	22.45	7.699	.616	.756
X1.5	22.43	8.554	.598	.760
X1.6	22.30	9.683	.435	.789
X1.7	22.25	9.252	.480	.781

2. Transparansi (x₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	22.22	7.971	.459	.710
X2.2	22.25	6.946	.569	.681
X2.3	22.24	8.043	.406	.721
X2.4	22.09	7.900	.444	.713
X2.5	22.23	7.731	.440	.714
X2.6	22.09	7.594	.501	.700
X2.7	22.02	8.449	.362	.730

3. Partisipasi Masyarakat (x₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.678	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	22.55	6.373	.453	.627
X3.2	22.63	6.379	.359	.652
X3.3	22.47	6.476	.326	.661
X3.4	22.19	7.177	.176	.696
X3.5	22.56	6.270	.392	.642
X3.6	22.53	5.558	.567	.586
X3.7	22.47	6.313	.448	.628

4. Pengelolaan Dana APBDes (y)

Reliability Statistics

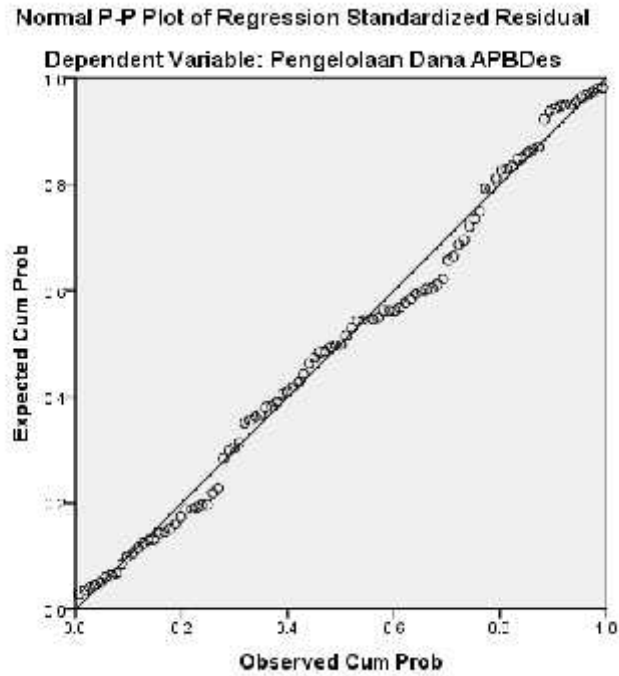
Cronbach's Alpha	N of Items
.646	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	22.41	6.061	.222	.643
Y.2	22.89	4.549	.439	.581
Y.3	22.82	4.987	.371	.605
Y.4	22.59	5.368	.324	.619
Y.5	22.64	4.499	.566	.536
Y.6	22.61	4.894	.499	.566
Y.7	22.35	6.068	.081	.684

Hasil Output SPSS Statistics Versi 22
Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



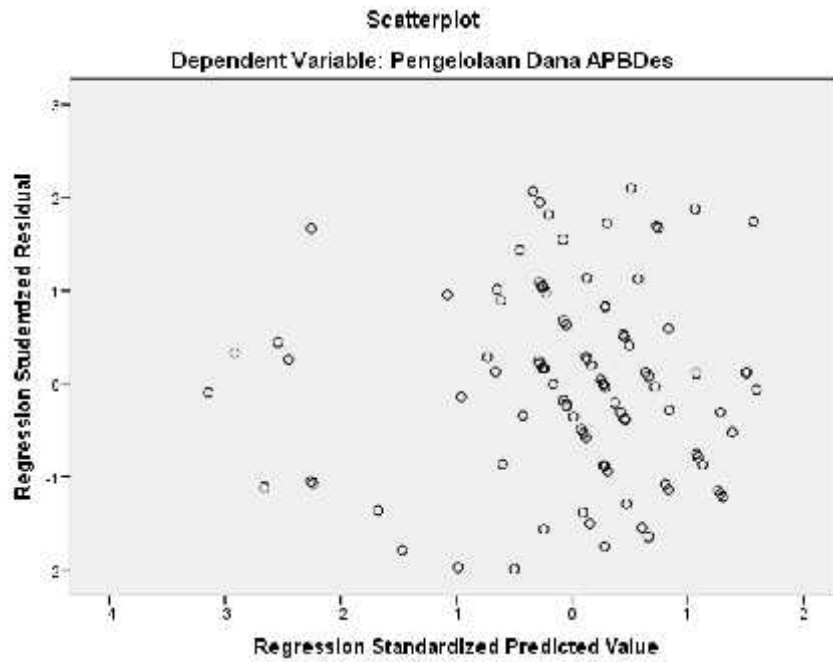
2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000		
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217	.454	2.205
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000	.367	2.724
Partisipasi	.401	.066	.392	6.111	.000	.509	1.966

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APDes

3. Uji Heteroskedastisitas



Hasil Output SPSS Statistics Versi 22
Uji Regresi Linier Berganda

1. Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000
Partisipasi Masyarakat	.401	.066	.392	6.111	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

2. Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000
Partisipasi Masyarakat	.401	.066	.392	6.111	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

3. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	525.463	3	175.154	128.045	.000 ^b
Residual	129.951	95	1.368		
Total	655.414	98			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.895 ^a	.802	.795	1.170

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

BIODATA PENULIS



Nama : Ika Wulandari
NIM : E20163001
TTL : Bondowoso, 14 Nopember 1997
Alamat : Wringin Pasar, Rt/Rw = 01/01, Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso
No. Hp : 082334127996
Program Studi : Akuntansi Syariah

Riwayat Pendidikan:

1. TK Tunas Harapan (2002-2004)
2. SDN Wringin 01 (2004-2010)
3. SMPN 1 Wringin (2010-2013)
4. SMAN 1 Tenggarang, Bondowoso (2013-2016)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2016-2020)

Pengalaman Organisasi:

1. Bid. Keilmuan OSIS SMPN 1 Wringin (2002-2004)
2. Bendahara Pramuka SMAN 1 Tenggarang (2008-2010)
3. Ketua Reka Jurnalis & Teknologi Pramuka IAIN Jember (2017-2018)
4. Staff Keuangan KOPMA Pandhalungan IAIN Jember (2017-2018)
5. Volunteer Relation Kelas Inspirasi Bondowoso #4 (2018)
6. Bendahara Komunitas Nusantara Youth Care Chapter 3 (2019)
7. Volunteer Relation Kelas Inspirasi Bondowoso #5 (2019)
8. Koordinator Volunter Relation Kelas Inspirasi Bondowoso #6 (2020)

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DI DESA WRINGIN, KECAMATAN WRINGIN, BONDOWOSO**

Ika Wulandari¹, Daru Anondo, S.E., M.Si²

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

ABSTRAK

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tiga prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. (2) untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. (3) untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. (4) untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso secara simultan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, berjumlah 99 orang. Alat analisa data berupa uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. (2) transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. (3) partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes. (4) akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana APBDes

Pendahuluan

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Virgie, 2013). Sistem tata kelola keuangan desa yang ada kemudian dikelola oleh pemerintah desa.

Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan, 2012). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa (Sumpeno, 2011).

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan desentralisasi yang menggunakan prinsip-prinsip *good*

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlihat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif, dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat komplain guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes

Pengelolaan APBDes

Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*).

APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Mahsun, 2015). Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Good governance adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN & BPKP RI, 2015).

Dari sembilan karakteristik *good governance* terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jumlah komponen ataupun prinsip yang

melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes secara simultan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Warga Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso yang berjumlah 7.443 warga yang tercatat pada dokumen profil Desa Wringin tahun 2019.

Teknik sampling pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Warga yang menjabat sebagai perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, KAUR dan KASI.
2. Warga yang menjabat sebagai Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW.
3. Warga yang menjabat di kepengurusan BPD, LPMD dan PKK.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Umar, 2008):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 10%.

Tabel 3. Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Alpha	r _{tabel}	r _{hitung}	Ket
1	Akuntabilitas (x ₁)	X1.1	0,05	0,1663	0,711	Valid
		X1.2			0,757	Valid
		X1.3			0,546	Valid
		X1.4			0,766	Valid
		X1.5			0,725	Valid
		X1.6			0,567	Valid
		X1.7			0,620	Valid
2	Transparansi (x ₃)	X2.1	0,05	0,1663	0,618	Valid
		X2.2			0,734	Valid
		X2.3			0,584	Valid
		X2.4			0,614	Valid
		X2.5			0,623	Valid
		X2.6			0,664	Valid
		X2.7			0,528	Valid
3	Partisipasi Masyarakat (x ₃)	X3.1	0,05	0,1663	0,453	Valid
		X3.2			0,603	Valid
		X3.3			0,577	Valid
		X3.4			0,420	Valid
		X3.5			0,548	Valid
		X3.6			0,737	Valid
		X3.7			0,647	Valid
4	Pengelolaan Dana APBDes (y)	Y.1	0,05	0,1663	0,372	Valid
		Y.2			0,672	Valid
		Y.3			0,597	Valid
		Y.4			0,531	Valid
		Y.5			0,737	Valid
		Y.6			0,671	Valid
		Y.7			0,314	Valid

Sumber: Data diolah SPSS (2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dikatakan valid karena

$$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$$

Uji Realibilitas

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Alat ukur untuk

mengukur reliabilitas adalah *Chonbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai *Chronbach Alpha* > 0,60 maka reliabel dan sebaliknya (Sujarweni, 2014). Hasil pengujian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standarisasi	Keterangan
1	Akuntabilitas (x ₁)	0,799	0,60	Reliabel
2	Transparansi (x ₂)	0,741	0,60	Reliabel
3	Partisipasi Masyarakat (x ₃)	0,678	0,60	Reliabel
4	Pengelolaan Dana APBDes (y)	0,646	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS (2019)

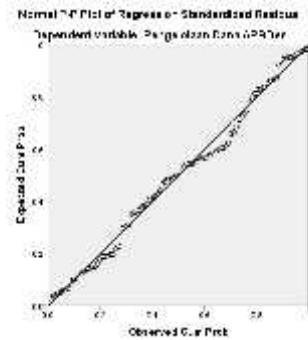
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut adalah reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2008).

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah kekanan atas (Suliyanto, 2011). Hasil uji normalitas data menggunakan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Dari tampilan grafik normal plot, terlihat titik-titik di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas (Suliyanto, 2011). Adapun hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000		
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217	.454	2.205
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000	.367	2.724
Partisipasi	.401	.066	.392	6.111	.000	.509	1.966

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APDes

Sumber: Data diolah SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji multikolinieritas

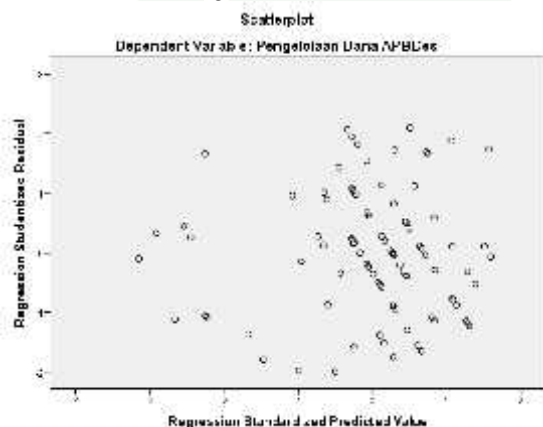
model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, karena dapat dilihat dari

nilai *Tolerance* pada masing-masing variabel bebas atau independen lebih besar dari 0,10. Sedangkan perhitungan VIF menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Zahriah, 2018). Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sebaliknya jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal (Suliyanto, 2011). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS (2019)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* di atas, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data tersebut dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dengan dua variabel bebas (misalnya x_1 dan x_2) dan satu variabel terikat (y) (Suharsaputra, 2012). Variabel bebas dari penelitian ini adalah akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2) dan partisipasi masyarakat (x_3). Sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan dana APBDes (y). Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Zahriyah, 2018):

$$y = c + x_1x_1 + x_2x_2 + x_3x_3 + c$$

Keterangan: y = Pengelolaan dana APBDes

- c = Konstanta
- x_1 = Koefisien variabel akuntabilitas
- x_2 = Koefisien variabel transparansi
- x_3 = Koefisien variabel partisipasi masyarakat
- c = Error

Hasil dari analisis regresi berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Persamaan Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000
Partisipasi Masyarakat	.401	.066	.392	6.111	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

Sumber: Data diolah SPSS (2019)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$y = + {}_1x_1 + {}_2x_2 + {}_3x_3 + c$$

$$y = 4,926 + 0,064x_1 + 0,415x_2 + 0,401x_3$$

Dimana:

y = Pengelolaan dana APBDes

x₁ = Akuntabilitas

x₂ = Transparansi

x₃ = Partisipasi masyarakat

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta () sebesar 4,926 menyatakan bahwa jika nilai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat konstan (tetap), maka pengelolaan dana APBDes adalah sebesar 4,926 artinya berpengaruh positif.
2. ₁ bernilai positif sebesar 0,064 menyatakan bahwa jika akuntabilitas mengalami kenaikan nilai satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar

0,064 pada pengelolaan dana APBDes dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

3. ₂ bernilai positif sebesar 0,415 menyatakan bahwa jika transparansi mengalami kenaikan nilai satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,415 pada pengelolaan dana APBDes dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

4. ₃ bernilai positif sebesar 0,401 menyatakan bahwa jika partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,401 pada pengelolaan dana APBDes dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

Uji T (Parsial)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6. Uji T (Parsial) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.926	1.128		4.368	.000
Akuntabilitas	.064	.052	.084	1.242	.217
Transparansi	.415	.061	.513	6.800	.000
Partisipasi Masyarakat	.401	.066	.392	6.111	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

Sumber: Data diolah SPSS (2019)

Adapun nilai t_{tabel} dalam penelitian ini adalah 1,98525. Nilai ini diperoleh dari $t_{tabel} = t(0,05/2 : 99-4)$. $t_{tabel} = t(0,025 : 95)$.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

1. H1 : Akuntabilitas (x_1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)
H0 : Akuntabilitas (x_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)
2. H2 : Transparansi (x_2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)
H0 : Transparansi (x_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)
3. H3 : Partisipasi masyarakat (x_3) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)
H0 : Partisipasi masyarakat (x_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes (y)

Berdasarkan data di atas maka diperoleh:

1. Nilai t_{hitung} pada variabel akuntabilitas (x_1) adalah sebesar 1,242, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98525. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} 1,242 < 1,98525$ t_{tabel}) sedangkan tingkat signifikansi $0,217 > 0,05$. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

2. Nilai t_{hitung} pada variabel transparansi (x_2) adalah sebesar 6,800, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98525. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} 6,800 > 1,98525$ t_{tabel}) sedangkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H2 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.
3. Nilai t_{hitung} pada variabel partisipasi masyarakat (x_3) adalah sebesar 6,111, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98525. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} 6,111 > 1,98525$ t_{tabel}) sedangkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H3 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes.

Uji F (Simultan)

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes secara bersama-sama. Berikut ini hasil pengujian secara simultan dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22.

Tabel 7. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	525.463	3	175.154	128.045	.000 ^b
Residual	129.951	95	1.368		
Total	655.414	98			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana APBDes

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data diolah SPSS (2019)

Adapun nilai F_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 2,70. Nilai ini diperoleh dari $F_{tabel} = F(3 : 99-3)$, $F_{tabel} = F(3:96)$.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa F_{hitung} sebesar 128,045 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena itu

probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($128,045 > 2,70$).

Maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas yang meliputi akuntabilitas (x_1), transparansi (x_2), dan partisipasi

